

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Alun-Alun

2.1.1 Definisi alun-alun

Alun-alun adalah suatu lapangan terbuka persegi empat yang biasa terdapat pada desa-desa yang agak besar atau ibukota propinsi di Jawa yang pada satu sisinya terdapat masjid dan pada sisi yang lain merupakan tempat tinggal penguasa daerah. Dari pengertian ini mengisyaratkan apabila di dekat alun-alun terdapat tempat tinggal penguasa daerah maka bisa dianggap bahwa alun-alun terletak di tengah kota atau berfungsi sebagai pusat kota (Raffles, 1978: 2).

Pengertian alun-alun sebagai lapangan terbuka diperkuat dengan pemakaian kata alun-alun dalam Kakawin Bharata Yuda (pada Pupuh 39 Bait 2), ‘...*alaris tekeng alun-alun...*’ (berjalan sampai alun-alun) yang menjelaskan konteks kata alun-alun bermakna “lapangan” (Mardiarsito *dalam* Pangarsa, 2002: 1). Lebih dalam menemukan definisi alun-alun sebagai lapangan terbuka, Tjandrasmita (2000: 42) mengungkapkan, lapangan terbuka yang berfungsi sebagai tempat pertemuan masyarakat selain dalam upacara besar ialah alun-alun yang biasanya terdapat di depan keraton. Apabila lapangan itu terletak di depan atau di belakang keraton, maka alun-alun tentunya erat hubungannya dengan kehidupan keraton atau pemerintahan masa dulu. Selain itu, dalam Pupuh 9 bait 2 Negarakertagama mencatat pemakaian kata ini “...*mungwin watanan alun-alun kan pgat maganti...*”, yang artinya “...bertempat di rumah penjagaan di alun-alun, (mereka) tak ada hentinya berganti-ganti...”. Kutipan Negarakertagama di atas adalah juga dalam konteks menggambarkan para pengawal keraton, oleh karena itu diduga alun-alun tersebut berada di dekat keraton (Adrisijanti, 2000: 190).

2.1.2 Kosmologi keruangan alun-alun

Dalam kitab Negarakertagama tertulis dengan jelas bahwa keberadaan alun-alun sudah dimulai sejak abad ke-14 peradaban Majapahit (Wirjomartono, 1995: 47). Searah pandang dalam kajian kosmologis, Prijotomo (1983: 29), memahami bahwa konsep alun-alun pada Keraton Majapahit menggunakan kerangka pikir masyarakat Jawa (Jawa-Hindu), yaitu adanya interaksi antara sumbu religi dan sumbu bumi yang dikenal dengan konsep *mancapat* yang diperlukan sebagai penetralisir konflik. *Manca* terbentuk

dari dua kata, yaitu *manca* yang berarti luar dan *pat* yang berarti empat. *Mancapat* sering dianut oleh orang Jawa sebagai pusat orientasi spasial. Arah empat ini dipegang oleh orang Jawa dalam hubungannya dengan empat unsur pembentuk keberadaan *bhuwana*: air, bumi, udara dan api. Dasar pembentuk kehidupan ini kemudian diturunkan sebagai dasar kategorisasi untuk hal-hal lain, misalnya tata ruang pada kawasan alun-alun (Wiryomartono, 1995: 46).

Kosmologi keruangan alun-alun tradisional (asli) dapat dilihat dari keruangan Alun-alun Kota Yogyakarta. Hal ini merujuk pada sejarah bahwa Kota Yogyakarta merupakan kota terakhir yang direncanakan sendiri tata ruangnya oleh penguasa pribumi sebelum datangnya penjajah Kolonial Belanda yang dalam masa kekuasaannya banyak melakukan intervensi fisik dalam perencanaan tata ruang kota-kota di Jawa.

Apabila alam atau jagat raya ini dianggap sebagai makrokosmos, maka alun-alun merupakan perwujudan jagat raya yang diistilahkan sebagai mikrokosmos. Kesatuan mikrokosmos dan makrokosmos ini dapat juga diartikan sebagai usaha manusia untuk mendekati diri dengan Allah diantara banyaknya godaan dalam kehidupan. Dalam ajaran islam, manusia mendapat dua pilihan antara hidup yang dimurkai Allah atau hidup yang diridhai Allah. Hal ini dapat dilihat dari adanya masjid agung di sebelah barat alun-alun dan bangunan penjara di sebelah timur alun-alun (Khairudin, 1995: 53).

Sebagai perwujudan mikrokosmos, keruangan alun-alun didasarkan pada azas mikrokosmos hirarkis dan mikrokosmos dualistis. Perwujudan dari azas mikrokosmos dualistis umumnya tampak dari penempatan benda secara simetri (semua penataan keraton dan elemen-elemen di sekelilingnya biasanya diusahakan simetris). Semua bentuk penempatan simetris dimaksudkan untuk melambangkan keadaan harmonis dari hal-hal yang bertentangan (Handinoto, 1996: 14). Hal-hal yang bertentangan ini harus diatur secara simetris atau ditempatkan pada arah yang berlawanan, sehingga akan mewujudkan keadaan yang dinamis misalnya unsur air ditempatkan di timur, dan lawan air, yaitu unsur api ditempatkan di barat. Sementara untuk azas mikrokosmos hirarkis menunjukkan hirarki-hirarki pembagian ruang dimana semakin kedalam, maka ruang bersifat semakin sakral dan sebaliknya semakin keluar maka ruang bersifat semakin profan.

Kosmologi keruangan alun-alun juga merupakan manifestasi dari konsep "*hablum minallah dan hablum minannas sangkan paran dumadi manunggaling kawula gusti*". Hal ini ditunjukkan dari *layout* keruangan alun-alun yang membujur membentuk

sumbu imajiner utara-selatan dengan orientasi di bagian selatan adalah Laut Selatan dan di bagian utara adalah Gunung Merapi (Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 2004: 28).

Alun-alun Kota Yogyakarta terdiri dari dua bagian, yaitu alun-alun utara dan alun-alun selatan. Alun-alun utara merupakan simbolisasi menyatunya Allah dengan Sultan, sementara alun-alun selatan merupakan simbol dari keinginan seksual. Alun-alun utara berbentuk persegi empat berukuran 300 x 300 meter dan ditengahnya terdapat dua buah Pohon Beringin yang diberi nama Kyai Dewandaru dan Kyai Jagadaru (Sabdacarakatama, 2008: 106). Kedua Pohon Beringin ini menggambarkan kesatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos dimana Kyai Dewandaru melambangkan hubungan antara Allah dengan Sultan, sedangkan Kyai Jagadaru melambangkan hubungan manusia secara umum dan rakyat Yogyakarta secara khusus (Wodwark, 1999: 307). Alun-alun utara menggambarkan suasana *nglangut*, yaitu suasana hati tapa sepi, yaitu suasana hati ketika semedi (Brotodiningrat, 1978: 20). Dalam melaksanakan semedi/sujud kepada Allah biasanya penuh dengan godaan yang tercermin dari luasnya alun-alun. Luasnya alun-alun juga menggambarkan luasnya masyarakat dengan berbagai bentuk dan sifat yang mempengaruhi iman seseorang untuk beribadah kepada Allah (Khairudin, 1995: 53).

Merujuk pengertian alun-alun dari arti kata alun-alun itu sendiri yang berasal dari kata alun yang berarti gelombang, menunjukkan bahwa alun-alun merupakan simbolisasi gelombang yang mengayunkan hidup manusia dalam kehidupan masyarakat. Gelombang ini digerakkan oleh angin dari segala penjuru. Hal ini digambarkan dengan adanya Pohon Beringin yang mengelilingi alun-alun (Brotodiningrat, 1978: 59). Adapun jumlah Pohon Beringin yang mengelilingi alun-alun sebanyak 64 buah yang menggambarkan akhir usia Nabi Muhammad SAW dalam tahun Masehi. Pohon Beringin tersebut ditata dedaunannya dengan dipangkas yang menyerupai *songsong* (payung) agung (Sabdacarakatama, 2008: 106). Pohon Beringin ini juga merupakan simbolisasi pengharapan Sultan akan panjang umur sebagaimana panjangnya umur Pohon Beringin. Selain keberadaan Pohon Beringin, di depan Alun-alun Utara terdapat *gedhog pakunjaran* (penjara) yang terdiri atas dua bangunan. Narapidana yang dipenjara di *gedhog pakunjaran* adalah narapidana tindak pencurian, perampokan, pembunuhan sementara narapidana yang lain ditempatkan di penjara kabupaten (Sabdacarakatama, 2008: 107). Selanjutnya, di sebelah barat Alun-alun Utara, tepat ditengah sejajar dengan Ringin Kurung berdiri Masjid Besar seluas 888

meter persegi. Pada perayaan grebeg, Alun-alun Utara digunakan untuk formasi baris-berbaris para prajurit keraton.

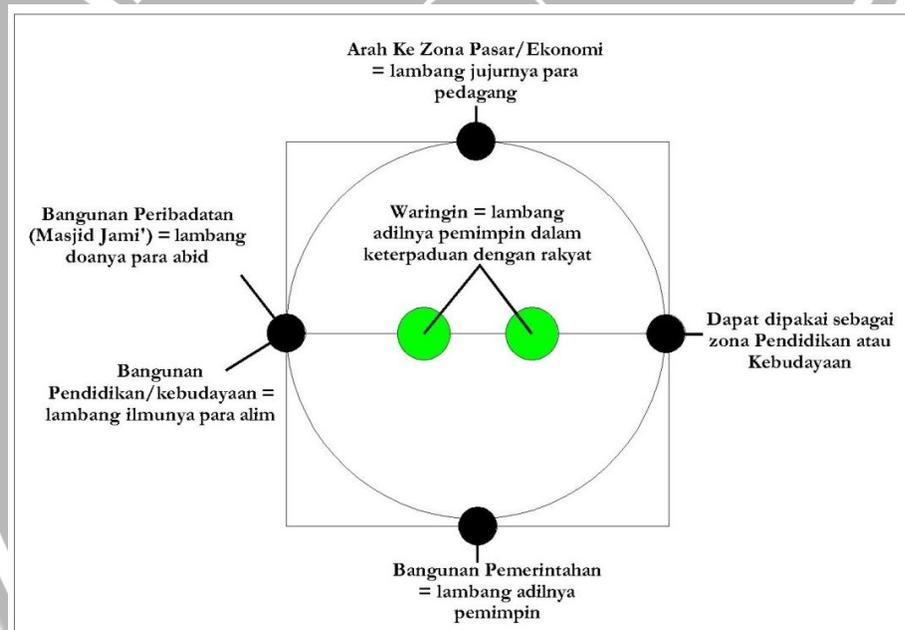
Sementara, mengenai keberadaan Alun-alun Selatan Kota Yogyakarta, Alun-alun Selatan berukuran 160 x 160 meter dan di sekelilingnya ditembok melingkar dengan tinggi 2,2 meter (Sabdacarakatama, 2008: 185). Pada alun-alun selatan terdapat lima buah jalan yang merupakan simbolisasi dari panca indera. Ditengah tengah lapangan alun-alun selatan terdapat dua buah pohon beringin yang dikelilingi oleh pagar batu. Kedua buah pohon beringin ini dinamakan Ringin Supit Urang yang merupakan simbolisasi masa akhil baliq yang ditandai dengan pelaksanaan khitanan, sedangkan pagar batu tersebut merupakan gambaran bahwa bagian tersebut harus ditutupi atau disembunyikan (Woodwark, 1999: 300). Di bagian selatan alun-alun selatan atau tepatnya di sebelah selatan Ringin Supit Urang juga terdapat dua buah Pohon Beringin yang dinamakan Ringin Wok yang merupakan simbolisasi organ vital yang sangat rahasia sekali. Di sekeliling alun-alun selatan juga ditanami Pohon Kwaci dan Pohon Pakel dimana Pohon Kwaci melambangkan anak yang sudah mulai berani/remaja, sedangkan Pohon Pakel melambangkan bahwa anak sudah memasuki usia akhil balik. Adapun kegunaan Alun-alun Selatan diantaranya (Sabdacarakatama, 2008: 185-186):

- a. Tempat latihan baris berbaris prajurit keraton
- b. Tempat sowan abdi dalem wedana prajurit beserta anak buah
- c. Tempat untuk lomba panahan Sultan setiap Hari Senin dan Kamis
- d. Tempat adu harimau lawan kerbau (rampogan).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pangarsa (2002: 36), menemukan bahwa alun-alun merupakan peradaban arsitektur kota yang lahir dari rahim budaya muslim-Jawa. Alun-alun merupakan sebagian dari pemunculan kosmologi keislaman yang universal tentang pusat-tepi yang secara perennial muncul dengan langgam budaya lokal (Jawa). Beberapa nara sumber mengungkapkan, bahwasanya alun-alun merupakan salah satu penerjemahan konsep kesemestaan (kosmologi) yang berasal dari timbaan hadist yang diriwayatkan oleh AT-Tirmidzi: “Suatu masyarakat akan menjadi masyarakat adil makmur bila terdapat adilnya para pemimpin, jujurnya para pedagang, ilmunya para alim, doanya para abid dan sabarnya para fakir. Bila dicermati lebih lanjut, maka hubungan unsur pelaku aktifitas dalam alun-alun dengan kualitasnya menurut hadist diatas adalah sebagai berikut:

- Adilnya para pemimpin disimbolkan dengan penempatan keraton di sebelah selatan alun-alun
- Jujurnya para pedagang disimbolkan dengan peletakan pasar di sebelah utara alun-alun
- Ilmunya para alim dan doanya para abid disimbolkan oleh bangunan masjid di sebelah barat alun-alun
- Sabarnya para fakir disimbolkan oleh lapangan (alun-alun) itu sendiri yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya rakyat dengan simbolisasi Pohon Beringin di tengahnya sebagai simbol keadilan dan pengayoman.

Apabila digambarkan secara skematis, representasi dari timbaan hadist tersebut dalam tata ruang alun-alun sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Fakta Empiris Historis Alun-alun Dikaitkan Dengan Konsep Nilai Kemasyarakatan Dari Hadist (Pangarsa 2002: 40).

2.1.3 Tipologi alun-alun

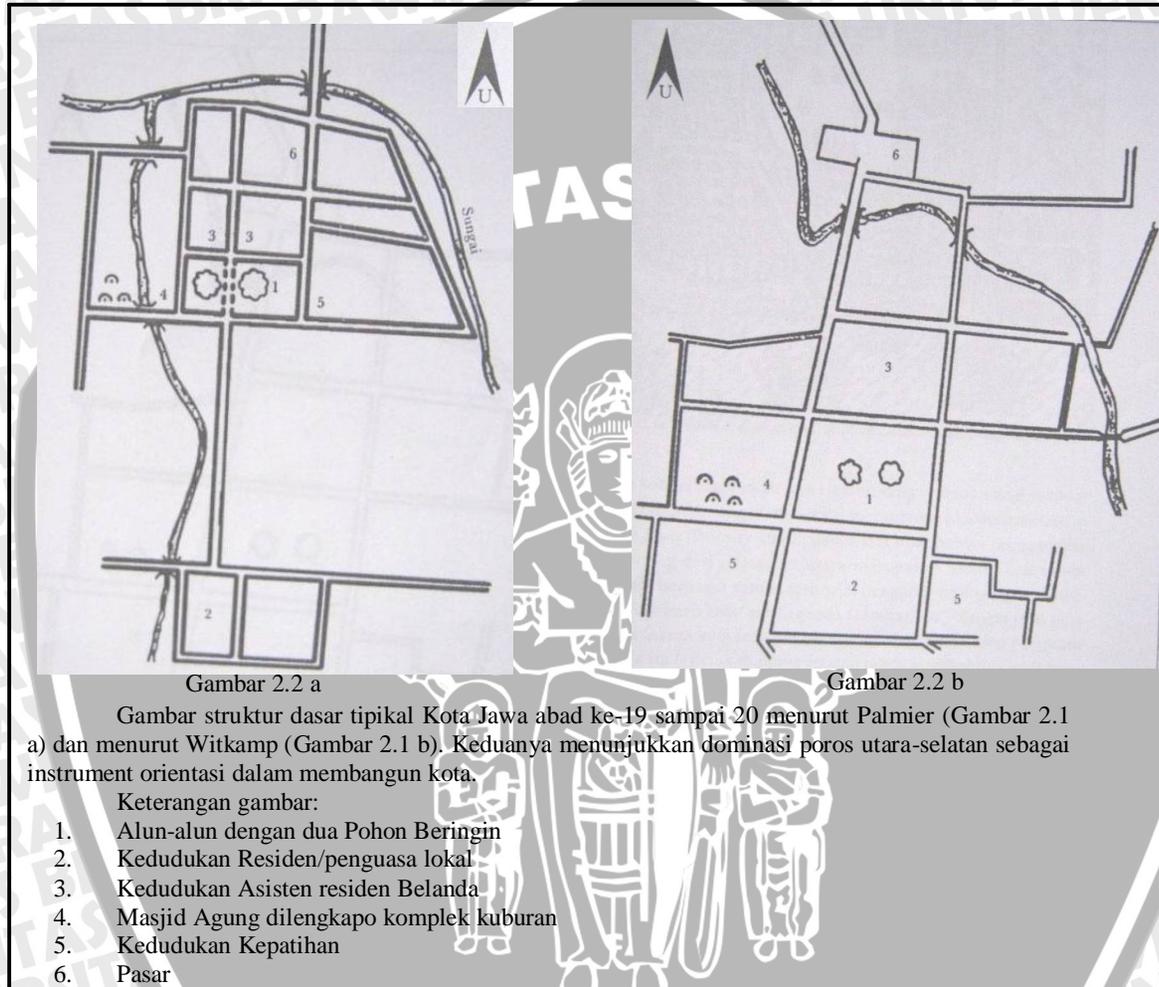
Handinoto (1996: 13), mengungkapkan alun-alun biasanya berupa kotak atau *square* yang merupakan pertemuan dari jalan-jalan utama yang menghubungkan keraton dengan bagian barat, utara dan timur dari kota. Serupa dengan pendapat tersebut, dalam kenyataan fisiknya, alun-alun sering ditemukan berupa lapangan terbuka berbentuk segi empat atau hampir bujur sangkar, namun ditemukan juga bentuk denah alun-alun yang

berupa jajaran genjang, yaitu di Yogyakarta (Wirjomartono, 1995: 46). Selain itu, alun-alun juga selalu lekat dengan adanya dua beringin kurung pada sumbu yang ditarik dari kabupaten atau kadipatennya (Wirjomartono, 1995: 55).

Dari segi tipologi, Handinoto (1996: 13), mengamati adanya alun-alun tidak bisa dilepaskan dari bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Di sebelah selatan alun-alun terletak keraton raja atau penguasa setempat. Di sebelah barat ada masjid agung, sedangkan sejumlah bangunan resmi lainnya didirikan di sisi barat atau timur alun-alun. Daerah selatan merupakan daerah tempat tinggal keluarga raja dan pengikutnya atau daerah yang bersifat sakral, sedangkan daerah utara alun-alun merupakan daerah yang bersifat profan.

Pada perkembangan selanjutnya di masa kolonial Belanda, pada ujung utara-selatan di kedua alun-alun sering diletakkan rumah dinas asisten residen dan bupati yang saling berhadapan. Medukung catatan yang dikemukakan oleh Handinoto, Tjandrasasmita (2000: 42) mengungkapkan, di sisi sebelah timur seringkali dibangun losmen dan di sisi sebelah barat dari alun-alun biasanya terdapat masjid, sedang pusat perekonomian atau pasar umumnya tidak begitu jauh dan berada di sebelah utara.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Adrisijanti (2000: 179), bangunan di kawasan alun-alun mempunyai satu keterkaitan, yaitu alun-alun di sebelah utara keraton, masjid agung di sebelah barat, dan pasar berada di sebelah utara alun-alun. Bangunan tersebut menyebabkan adanya fungsi kawasan dengan kegiatan perdagangan, pemerintahan dan peribadatan, sehingga kawasan tersebut disebut sebagai kawasan pusat kota sebagaimana struktur dasar tipikal Kota Jawa abad ke-19 sampai 20 yang digambarkan oleh Palmier dan Witkamp (Gambar 2.2).



Gambar struktur dasar tipikal Kota Jawa abad ke-19 sampai 20 menurut Palmier (Gambar 2.1 a) dan menurut Witkamp (Gambar 2.1 b). Keduanya menunjukkan dominasi poros utara-selatan sebagai instrument orientasi dalam membangun kota.

Gambar 2.2 Struktur Dasar Tipikal Kota Jawa Abad Ke-19 Sampai 20

(Sumber: Santoso, 2008: 142-143)



Kota Malang

Kota Kediri

Kota Lumajang

Kota Blitar

Kab. Nganjuk



Kota Gresik

Alun-alun Lor Yogya

Alun-alun Kidul Yogya

Alun-alun Lor Surakarta

Alun-alun Kidul Surakarta



Kab. Bojonegoro

Kab. Madiun

Kab. Sidoarjo

Kota Pasuruan

Kab. Banyuwangi

Gambar 2.3 Bentuk alun-alun kota-kota di Jawa
(www.google-earth.com, diakses tanggal 3 Desember 2008).



Dari gambar 2.3 di atas terlihat bahwa bentuk alun-alun umumnya berbentuk segie empat dengan beberapa vegetasi atau pepohonan di dalamnya. Apabila dilihat pada kondisi eksistingnya, posisi kantor kabupaten pada beberapa kota tersebut tidak selalu berada di selatan, ada yang berada di utara seperti yang terlihat pada Kota Blitar, ada juga yang berada di sebelah timur seperti yang terlihat di Kota Kediri, Kota Malang dan Kota Pasuruan dan ada juga yang berada di sebelah selatan alun-alun seperti yang terlihat pada Kabupaten Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sidorajo, Kota Solo dan Yogyakarta. Studi banding pada beberapa kota yang mempunyai Alunalun, baik di pedesaan, kecamatan maupun kota (Kabupaten/Kotamadya) di Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, menunjukkan bahwa pola pertumbuhan alun-alun pada prinsipnya sama, dimana unsur bangunan penguasa (Pemerintah Daerah) dan masjid selalu menyertainya. Hanya pada tingkat kota, terdapat bangunan penjara dan itu pun tidak selalu ada (Ahdiat, 1993:1).

2.1.4 Fungsi alun-alun

Adrisijanti (2000: 180) membagi fungsi alun-alun berdasarkan beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

- Dalam tata ruang kota, keberadaannya berfungsi sebagai ruang terbuka di antara keraton atau pusat pemerintahan-kekuasaan daerah;
- Dari aspek filosofis religius, alun-alun berfungsi sebagai tempat untuk menampung luapan jemaah dari masjid agung, selain itu alun-alun juga digunakan sebagai tempat dilangsungkan tradisi praktik keagamaan (Islam) seperti Grebeg Maulud atau dengan kata lain sebagai sarana penunjang dalam kegiatan keagamaan;
- Alun-alun juga mempunyai fungsi ekonomis karena pasar berada di dekatnya atau di pinggirnya; dan
- Alun-alun jika ditinjau dari aspek kultural, sebagai tempat pelaksanaan rampog macan, dimana seekor atau beberapa harimau dilepas di tengah-tengah lapangan diadu dengan beberapa ekor kerbau, sedangkan empat tepi setengah lapangan yang dipakai, dipagar betis oleh pasukan keraton yang bersenjata tombak. Harimau disimbolkan sebagai orang barat (Belanda) yang harus dilawan karena membahayakan para kerbau, yaitu kaum pribumi-petani.

Adapun fungsi alun-alun yang lain diantaranya (Handinoto, 1983: 8-12):

- Sebagai tempat untuk berkomunikasi antara penguasa/raja dengan rakyatnya. Pada jaman dahulu, apabila ada rakyat yang ingin bertemu dan menyampaikan sesuatu kepada raja, maka rakyat harus duduk dan menunggu pada jalan diantara dua buah Pohon Beringin yang mana kegiatan ini dahulu dinamakan *ritus pepe*. Ritus ini merupakan perwujudan demokrasi dari masyarakat bawah.
- Sebagai alat pertahanan dari serangan luar
Dengan adanya sebidang tanah yang luas di depan istana, maka apabila musuh datang dari luar keraton, ia harus melintasi tanah lapang itu baru kemudian dapat mencapai keraton. Dengan demikian ada waktu bagi raja untuk mempersiapkan strateginya ataupun lari. Dengan adanya lapangan (alun-alun) ini, musuh tidak akan muncul dengan tiba-tiba tanpa lebih dulu diketahui, sehingga dapat disimpulkan pada jaman dahulu alun-alun telah menjadi salah satu teknik penyusunan ruang dalam tata ruang keraton yang berfungsi untuk memperkuat/mempertahankan kedudukan keraton dari serangan musuh.
- Sebagai ruang untuk kegiatan bersama
Ada kebiasaan warga desa jaman dulu apabila seorang warga yang berani menangkap seekor harimau hidup-hidup, maka harimau yang tertangkap itu akan dibawa ke tengah-tengah alun-alun dan sebelum membunuhnya mereka menari-nari dan diiringi bunyi-bunyian dan penduduk desa menganggap hal ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sampai saat ini di beberapa desa di Jawa, alun-alun juga dipakai untuk mengadakan pertunjukan yang bersifat hiburan insidental seperti taman hiburan dan pasar malam. Dalam perkembangannya alun-alun digunakan untuk kepentingan olahraga, upacara peringatan hari besar, tempat untuk latihan militer dan sebagainya. Ditinjau dari segi ini, maka alun-alun adalah sebagai ruang bersama.

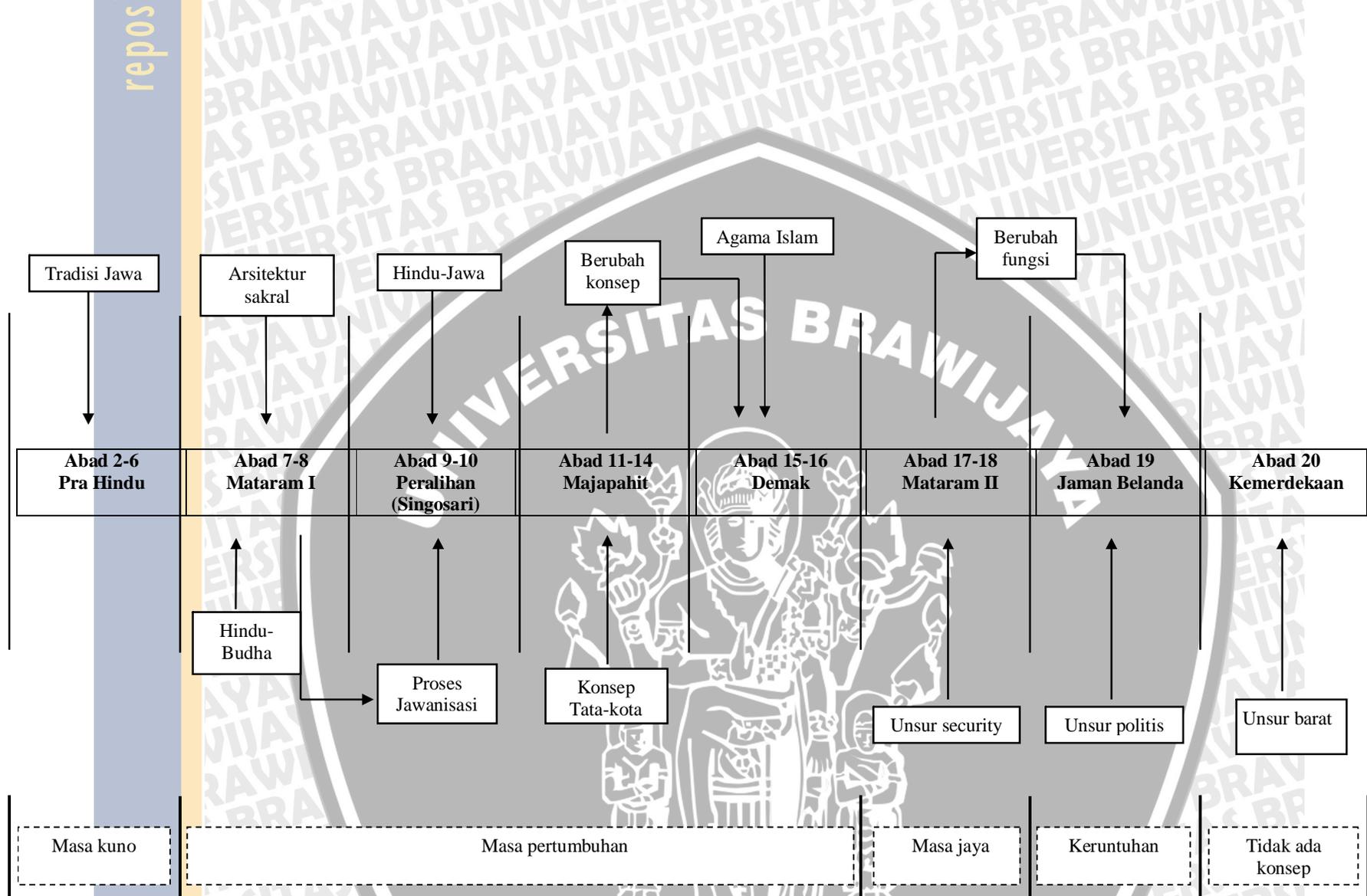
2.1.5 Tinjauan perkembangan alun-alun di Pulau Jawa

Menurut Koesmartadi (1995: 50), alun-alun dan kawasan sekitarnya merupakan hasil proses sejarah yang erat hubungannya dengan kebudayaan pada masanya. Unsur estetis, politis, fungsi serta peranan mewarnai dalam periode yang panjang. Tahapan-tahapan periode sejarah dalam proses pembentukannya adalah sebagai berikut:

- a. Periode Pra Hindu (abad 2-6);
- b. Periode Mataram I (abad 7-8);
- c. Periode Peralihan (abad 9-10);

- d. Periode Majapahit (abad 11-14);
- e. Periode Islam (abad 15-16);
- f. Periode Mataram II (abad 17-18);
- g. Periode Jaman Kolonial Belanda (abad 18-19); dan
- h. Periode Kemerdekaan (abad 20).





Gambar 2.4 Diagram Sejarah Perkembangan Alun-alun Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Di Jawa

(Sumber: Handinoto, 1983: 13).

Dari gambar 2.4 diatas menunjukkan bahwa alun-alun yang ada sekarang sebagai public space merupakan warisan sisa kebudayaandari jaman nenek moyang. Alun-alun disamping merupakan suatu ciri kota di Jawa, juga merupakan pusat orientasi daripada kota itu sendiri, sehingga hal ini mudah untuk dikenali pada setiap kota kabupaten di Jawa. Alun-alun merupakan hasil proses sejarah yang erat hubungannya dengan kebudayaan pada jamannya. Unsur estetis, politis, fungsi dan peranan sempat mewarnai di dalam suatu periode yang panjang.

1. Periode Pra Hindhu (abad 2-6)

Pada periode ini kehidupan masyarakat masih sangat primitif. Masyarakat hidup dari hasil bercocok tanam dan masih memegang kuat terhadap hal-hal yang bersifat kosmis dan menganut kepercayaan terhadap dewa-dewi. Pada masa ini, masyarakat membuat sebidang tanah sakral yang berbentuk persegi empat, yang dimaksudkan sebagai tempat upacara kepada dewa tanah dan dewi langit pada saat akan dimulainya bercocok tanam dengan tujuan agar mendapat hasil pertanian yang berlimpah. Perkembangan lebih lanjut, sebidang tanah persegi empat sebagai tempat upacara sakral inilah yang berkembang menjadi alun-alun.

2. Periode Mataram I (abad 7-8)

Pada abad ini di Jawa Tengah berdiri suatu kerajaan besar yang diperintah oleh Dinasti Syailendra, yakni Kerajaan Mataram. Pengaruh agama yang masuk adalah agama Hindhu baru kemudian disusul dengan masuknya agama Budha. Pada masa ini konsep tata ruang kota sudah sangat jelas pengaturannya. Tata letak pusat kerajaan dan pengikutnya disusun berdasarkan sistem Magersari, yaitu kedudukan raja dikelilingi oleh para pengikutnya. Selain berfungsi sebagai konsepsi pertahanan-keamanan juga berfungsi dalam bidang sosial budaya. Secara umum dapat disebutkan bahwa dari kenyataan sejarah mengenai pertumbuhan kota sebagai pusat kerajaan, alun-alun merupakan lapangan terbuka yang terletak di depan kediaman raja yang disebut keraton dan penggunaannya merupakan hak mutlak raja. Alun-alun berfungsi sebagai tempat raja memperlihatkan dirinya kepada rakyatnya dan tempat melangsungkan acara tertentu yang diselenggarakan oleh keraton.

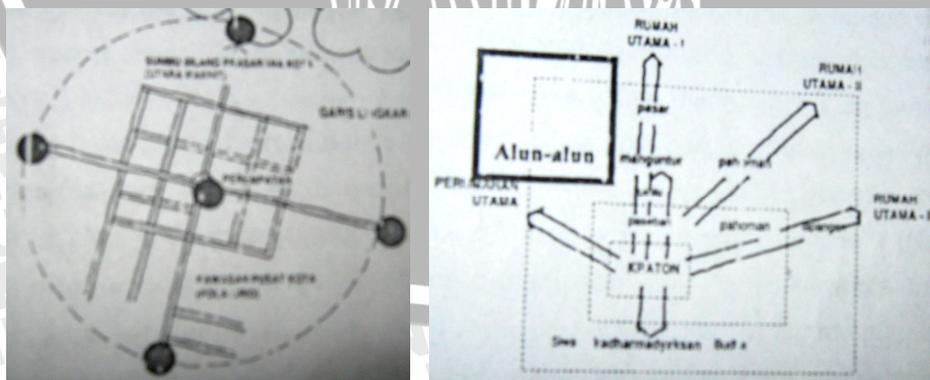
3. Periode Peralihan (abad 9-10)

Pada periode ini terjadi Proses Javanisasi, yaitu proses meleburnya kebudayaan Hindhu-Budha dengan kebudayaan asli Indonesia menjadi Hindhu-Jawa. Konsep tata ruang pada jaman Hindhu-Jawa ini dapat dilihat pada sistem tata kota yang ada di Kota Gede Jawa Tengah. Kota Gede merupakan suatu hasil penanganan dari Bangsa

Indonesia asli pada jamannya. Sistem pengaturan kotanya sudah cukup jelas dan rapi begitu juga konsep alun-alun, tidak hanya letaknya yang berada di depan istana raja tapi juga sudah ditentukan bangunan apa saja yang seharusnya didirikan di dekat alun-alun. Selain itu juga sudah ada cara pengaturan tata kota dengan sistem poros yang lebih dikenal dengan poros utara-selatan. Keraton berorientasi ke arah selatan seiring dengan kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul, sedangkan bangunan peribadatan berada di timur sesuai dengan kepercayaan terhadap Dewa Matahari.

4. Periode Majapahit (abad 11-14)

Majapahit sebagai kerajaan besar pada masa ini sudah memiliki sistem tata kota yang teratur. Ciri kotanya ditandai dengan adanya pagar keliling, jaringan jalan yang berpola grid yang terdapat pos penjagaan pada setiap sudutnya. Studi komprehensif yang cukup teliti tentang Kota Majapahit (situs trowulan) menunjukkan bahwa pusat pemerintahan Kota Majapahit memuat komponen-komponen keraton, manguntur, dalem pembesar negara (bangsawan), agama syiwa dan budha serta lapangan luas. Sistem ordinat dengan dua sumbu jalan utama yang membujur utara-selatan dan timur-barat bertemu di satu titik perempatan sakral. Pola ini lah yang merupakan pola dasar keruangan Kota Majapahit. Lapangan yang terletak di sebelah utara keraton, bukanlah pusat sistem keruangan, begitu juga kedudukan Pohon beringin juga bukan sebagai pusat ruang (Hermanislamet, 1999: 168-170). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa alun-alun bukan merupakan konsep keruangan Majapahit, namun alun-alun tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas interaksi sosial pada masyarakat Majapahit yang letaknya berdekatan pula dengan kompleks hunian Patih Gajah Mada. Untuk lebih jelasnya pola keruangan Majapahit dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Pola Keruangan Majapahit (Hermanislamet, 1999: 169).

5. Periode Islam (abad 15-16)

Dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa, unsur-unsur tradisional dalam perencanaan tata kota masih dipertahankan keasliannya seperti istilah-istilah pada bagian keraton, sistem tata kota di pedalaman maupun pola susunan keruangan pusat kota. Perubahan penting pada periode ini adalah perubahan letak bangunan suci pada jaman islam yang disebut masjid, didirikan di sisi barat alun-alun, dan alun-alun berfungsi untuk menampung jemaah yang tidak tertampung dalam masjid. Penyebaran islam di daerah pedalaman relatif lebih sulit karena pengaruh Hindhu-Jawa masih kuat sekali dan adanya kendala geografis, sehingga islamisasi berkembang baik di pesisir utara.

6. Periode Mataram II (abad 17-18)

Pada periode ini Kerajaan Mataram merupakan penguasa terbesar di Pulau Jawa. Ibukota kerajaan ini berada di Yogya dibawah pemerintahan Pangeran Mangkubumi. Tata kota dan elemen kotanya ditangani secara cermat. Pada dasarnya sistem pengaturan kotanya tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya seperti letak masjid, keraton, alun-alun, pasar serta dominasi poros utara-selatan, namun dalam perkembangannya alun-alun mewadahi berbagai fungsi lainnya sesuai dengan kekhasan dan kekuasaan Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian pangeran membangun alun-alun di bagian selatan keraton yang dinamakan alun-alun selatan. Kedua alun-alun yang ada baik alun-alun utara maupun alun-alun selatan memiliki makna magis filosofis berikut komponen yang ada di sekelilingnya seperti kandang harimau, Pohon Beringin dan sebagainya.

7. Periode Belanda (abad 19)

Kedatangan Belanda yang semula hanya berdagang lambat laun menjadi penjajah yang sangat merugikan Bangsa Indonesia. Belanda banyak melakukan banyak perombakan sistem pemerintahan dengan meletakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistem barat. Salah satu hal yang mendukung sekali akan sistem yang diterapkan adalah pemanfaatan alun-alun sebagai pusat kota/pusat pemerintahan untuk dipakai sebagai alat pengontrol dengan jalan memindahkan/membangun prototype alun-alun di setiap kabupaten di Pulau Jawa, maka sejak itulah di setiap kabupaten di Jawa terdapat alun-alun sebagai pusat kota dan pusat pemerintahan daerah setempat. Sistem Magersari yang ada pada periode Mataram sebagai pertahanan berubah fungsinya sebagai alat kontrol bagi daerah jajahan. Masuknya pengaruh kolonial ini memberi pengaruh pada tata spasial alun-alun seperti bangunan kolonial pemerintahan yang

selalu berorientasi ke alun-alun (berada di sebelah selatan alun-alun) dan adanya bangunan penjara serta gereja.

8. Periode Kemerdekaan (abad 20)

Pada periode ini ada kecenderungan masyarakat yang telah memiliki sikap demokratis untuk mengubah alun-alun menjadi *public space*/plasa dan sebagainya, seperti halnya alun-alun di Kota Malang dan Bandung. Dalam hal ini, seolah-olah perombakan alun-alun merupakan transformasi dari kebudayaan barat yang diterapkan begitu saja tanpa mempelajari tentang apa dan bagaimana terjadinya alun-alun di Jawa. Tidak ada konsep yang jelas dalam penanganannya menyebabkan fungsinya tidak beraturan di setiap kota kabupaten dimana alun-alun tersebut berada.

Pendapat lain mengungkapkan, Gill *dalam* Koesmartadi (1995: 50), perkembangan alun-alun terdiri atas:

- a. Alun-alun Kota Lama; dan
- b. Alun-alun Kota Baru.

Lebih lanjut menurut Handinoto *dalam* Koesmartadi (1995: 50) alun-alun di Pulau Jawa perkembangannya dibagi atas:

- a. Masa Prakolonial;
- b. Masa Kolonial; dan
- c. Masa Pascakolonial.

Periodesasi perkembangan alun-alun memang selalu terbuka untuk dikaji-ulang sejalan dengan perkembangan sejarah budaya di Jawa, sehingga alun-alun dari masa ke masa selalu dimaknai kembali.

2.1.6 Tinjauan perkembangan alun-alun dalam konteks kota

Menurut Koesmartadi (1995: 49) tiap kota memiliki berbagai macam faktor pertumbuhan. Pertumbuhan ini tergantung dari lokasi, kepadatan kota setempat serta kaitannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Tipe perkembangan tersebut dibedakan atas:

1. Pertumbuhan kawasan secara perluasan;
2. Pertumbuhan dengan cara penggantian; dan
3. Pertumbuhan dengan cara penambahan.

Seperti pada pusat Kota Yogyakarta dan Surakarta dengan keberadaan dua alun-alunnya, alun-alun utara merupakan tempat resmi yang berhubungan dengan raja, sedangkan alun-alun selatan untuk putra mahkota sebagai persiapan untuk melakukan

upacara-upacara kenegaraan. Begitupula pada awalnya alun-alun di Jawa memang sering dianggap sebagai lapangan formal yang erat kaitannya dengan upacara kenegaraan dan tidak menampung kegiatan komersial. Bisa dikatakan ada kesan bahwa alun-alun memiliki makna spiritual.

Seiring dengan berkembangnya jaman dan berubahnya penguasa setempat, perubahan konsep alun-alun sangat mungkin terjadi seperti yang ditemukan pada kasus Kota Bandung, yaitu beralihfungsinya sebagian Alun-alun menjadi bagian dari perluasan ruangan Mesjid Raya Bandung dan sisanya menjadi halaman depan masjid. Pada kasus yang lain, perubahan makna alun-alun menjadi taman atau ruang terbuka umum kota adalah konsep *urban* yang dapat berkembang dalam kehidupan bermukim modern (Wiryomartono, 1995: 48). Kebutuhan masyarakat kota akan upacara atau ritual kenegaraan akan terdesak oleh kebutuhan pragmatis ekonomis *urban* modern, namun persepsi masyarakat terhadap alun-alun seperti maknanya semula tetap terpelihara dengan adanya kegiatan ritual yang berpusat di masjid, meskipun hanya sekali-sekali.

Terkait identifikasi perkembangan suatu kawasan, Wulandari (2002) dalam penelitiannya mengidentifikasi perkembangan kawasan Alun-alun Kota Semarang menggunakan metode pendekatan *synchronik* dan *diacronik*. Analisis *synchronik* adalah metode pendekatan untuk melihat peristiwa-peristiwa simultan terhadap perubahan yang terjadi pada suatu waktu yang dihubungkan dengan aspek lain seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik, sedangkan analisis *diacronik* adalah metode analisis untuk melihat perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu karena berkaitan dengan perubahan ide dalam sejarah. Adapun variabel yang digunakan dalam identifikasi perkembangan kawasan pada penelitian tersebut antara lain: fungsi kawasan, bangunan di sekitar kawasan, bentuk fisik bangunan dan lingkungan di sekitar kawasan dan aktivitas kawasan.

2.1.7 Tinjauan alun-alun sebagai ruang terbuka publik

Menurut Hakim dalam Ekafitrawan (2005: 18), ruang terbuka publik merupakan ruang terbuka di luar bangunan yang dapat digunakan oleh publik (setiap orang) dan memberi kesempatan untuk bermacam-macam kegiatan aktivitas tertentu dari masyarakatnya, seperti: taman bermain, plasa, makam, lapangan terbang, lapangan olahraga, taman rekreasi dan sebagainya. Definisi lain juga mengungkapkan ruang terbuka publik adalah ruang publik di luar bangunan yang setiap orang berhak untuk datang tanpa harus membayar untuk masuk serta tanpa memiliki batasan waktu untuk

berlama-lama duduk dan dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang dibawa sendiri. Contoh: alun-alun, taman, lapangan, jalur hijau, jalan dan ruang terbuka di sekitar rumah.

Ruang terbuka publik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka dan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka adalah ruang yang di atasnya tidak dimanfaatkan untuk bangunan seperti: lapangan, jalan, tempat parkir dan trotoar, sedangkan ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang mengandung unsur vegetasi dan bukan merupakan lahan kosong yang tidak digunakan. Contoh: taman kota, taman tempat bermain, lapangan olahraga (sepakbola), hutan kota dan jalur hijau. Darmawan (2003) mengungkapkan, fungsi ruang publik kota diantaranya:

1. Sebagai pusat interaksi, komunikasi masyarakat baik formal seperti: upacara bendera, sholat idul fitri maupun informal seperti pertemuan individual, kelompok masyarakat dalam acara santai dan rekreatif atau juga dimanfaatkan untuk demonstrasi sebagai bagian dari negara yang demokratis.
2. Sebagai ruang terbuka yang menampung koridor jalan yang menuju ke arah ruang publik tersebut dan sebagai ruang pengikat dilihat dari struktur kota, sekaligus sebagai pembagi ruang fungsi bangunan di sekitarnya serta ruang untuk transit bagi masyarakat yang akan pindah ke arah tujuan lain.
3. Sebagai tempat pedagang kaki lima menjajakan barang dagangannya.
4. Sebagai paru-paru kota

Carr (1992:12) membagi ruang publik kota dalam beberapa tipe dan karakter sebagai berikut:

1. Taman umum (Public Park)

Jenis dari taman umum ini diantaranya: taman nasional, taman pusat kota, taman lingkungan dan taman kecil (mini park).

2. Lapangan dan Plasa

Lapangan dan plasa dapat berupa lapangan pusat kota dan plasa pengikat

3. Tempat bersejarah

Merupakan ruang publik yang terbentuk di sekitar bangunan/tugu untuk mengenang kejadian penting bagi masyarakat kota tersebut.

4. Pasar (*market*)

5. Jalan (*streets*)

Teramsuk di dalamnya pedestrian, jalur lambat dan gang-gang

6. Tempat bermain (*playgrounds*)

7. Ruang komunitas
8. Jalur hijau dan jalan taman (greenways & parkways)
9. Ruang terbuka di lingkungan rumah
10. Waterfront

Ruang ini dapat berupa pelabuhan, pantai, bantaran sungai, bantaran danau dan dermaga.

Bentuk ruang terbuka oleh beberapa ahli diterjemahkan dalam beberapa sudut pandang, yakni berdasarkan bentuk fisik dan pola keruangannya dan berdasarkan fungsi serta aktivitasnya sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Bentuk Ruang Terbuka

Bentuk Ruang Terbuka berdasarkan bentuk fisik dan pola keruangannya	Bentuk Ruang Terbuka berdasarkan fungsi serta aktivitasnya
<p>Berbentuk memanjang: ruang terbuka yang mempunyai batas-batas di sisi-sisinya, seperti: jalan, sungai, pedestrian dan sebagainya. Ruang terbuka yang berbentuk memanjang ini juga merupakan ruang sirkulasi karena dimanfaatkan untuk melakukan pergerakan oleh masyarakat disekitarnya.</p> <p>Berbentuk cluster: ruang terbuka yang mempunyai batas-batas di sekelilingnya seperti plaza, square, lapangan, bundaran dsb. Ruang terbuka cluster membentuk "kantong-kantong" yang berfungsi sebagai ruang akumulasi aktifitas kegiatan masyarakat kota</p>	<p>Open utility: Ruang terbuka yang terbentuk karena fungsinya sebagai utilitas dan pelayanan bagi masyarakat kota seperti mempertahankan kualitas air, drainase, pengendali banjir. Contoh: hutan kota, waduk</p> <p>Open green: ruang terbuka disamping berfungsi taman juga berfungsi ekologis. Contoh: taman kota, tempat rekreasi, jalur hijau, boulevard</p> <p>Coridor space: ruang terbuka yang digunakan untuk pergerakan, transportasi dan pedestrian bagi mobilitas kota. Contoh: jalan, pedestrian, sempadan sungai</p>

Sumber: Krier & Eckbo dalam Ekafitrawan, 2005, 14-15

Dalam hal ini, bentuk alun-alun Kota Malang jika dilihat berdasarkan bentuk fisik dan pola keruangannya berupa ruang terbuka berbentuk *cluster*, sedangkan apabila dilihat berdasarkan fungsi serta aktivitasnya berbentuk *open green*.

Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat luas dengan berbagai tingkat kehidupan sosial-ekonomi-etnik, tingkat pendidikan, perbedaan umur dan motivasi atau tingkat kepentingan yang berlainan. Kriteria ruang publik yang esensial ada tiga, yaitu (Darmawan, 2003: 2):

1. *Responsive*, yakni tanggap terhadap semua keinginan pengguna dan dapat mengakomodir kegiatan yang ada pada ruang publik tersebut
2. *Democratic*, yakni dapat menerima kehadiran berbagai lapisan masyarakat dengan bebas tanpa ada diskriminasi

3. *Meaningfull*, yakni dapat memberi makna atau arti bagi masyarakat setempat secara individual maupun kelompok.

Ketiga aspek diatas kemudian diterjemahkan lagi dalam tiga elemen penting yang harus diperhatikan dalam setiap perencanaan ruang publik, yaitu human needs, right of use dan meaning. Adapun variabel dari ketiga elemen tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2 Kriteria Ruang Publik

Variabel <i>human needs</i>		Variabel <i>right of use</i>		Variabel <i>meaning</i>	
kenyamanan	iklim dan sirkulasi udara	kebebasan berperan secara aktif	kebebasan beraktivitas	mudah dipahami	landmark
	pencahaya-an	kebebasan berperan secara aktif	kebebasan visual		kejelasan batas area
	vegetasi	tuntutan pengakuan	kebebasan penggunaan ruang		<i>signage</i>
	kebersihan		kebebasan penggunaan fasilitas		akses untuk masuk dan keluar kawasan
ketersediaan fasilitas penunjang	tempat duduk			kesesuaian	desain tatanan fisik
	pedagang makanan/minuman				kesesuaian tatanan fisik
	lampu-lampu			hubungan dengan masyarakat aspek yang lebih luas	nilai sejarah nuansa romantis
	tempat sampah				
	tempat parkir toilet				
	telepon umum				
ketersediaan ruang untuk berperan secara aktif maupun pasif	ruang terbuka komunal taman pedestrian lapangan/fasilitas olahraga				
keamanan aksesibilitas					

Sumber: Darmawan, 2003: 2

Verawati (2005), dalam penelitiannya mengenai persepsi remaja terhadap ruang publik menggunakan variabel dalam *digram place* untuk menentukan kualitas ruang publik sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Kriteria Ruang Publik Berdasarkan Diagram Place

Aspek kenyamanan dan kesan	Aspek penggunaan dan aktvitas	Aspek keramahan	Aspek akses dan linkage
Keamanan	Kebebasan menggunakan ruang	Keramahtamahan	Kemudahan untuk dicapai
Kebersihan	Keragaman pemanfaatan ruang	Kecocokan sebagai tempat	Mudah dilalui
Penghujauan	Kualitas fasilitas penunjang	berkumpul/berinteraksi	Kedekatan dengan sarana transportasi

Lanjutan tabel 2.3

Aspek kenyamanan dan kesan	Aspek penggunaan dan aktivitas	Aspek keramahan	Aspek akses dan linkage
Dapat diduduki			Memiliki aksesibilitas tinggi
Kualitas sanitasi	fisik		
Kondisi bangunan			

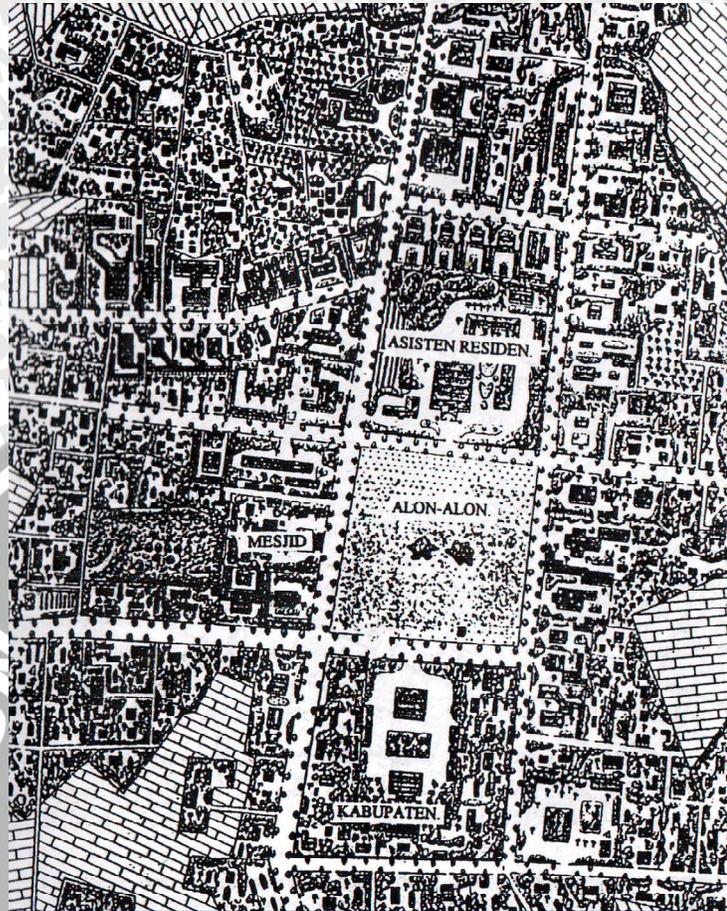
Sumber: Verawati, 2005: 20

2.2 Tinjauan Kota/Kabupaten di Jawa

2.2.1 Tipologi kota/kabupaten di Jawa

Handinoto (1996: 19), menggambarkan tipologi ibukota kabupaten di Jawa sebagai berikut:

Tata letak kotanya di dominasi oleh alun-alun yang lataknya di pusat kota. Pada axis utara-selatan di kedua ujung alun-alun terletak kediaman Asisten Residen dan Bupati saling berhadapan. Sebelah barat dari alun-alun terletak masjid, lengkap dengan tempat wudhu di depannya dan makam Jawa di sampingnya. Di samping kiri dan kanan dari masjid terdapat tempat tinggal penghulu dan ada juga barak polisi militer dan penjara. Di sisi sebelah timur terdapat losmen atau rumah biasa bersama dengan tempat tinggal orang-orang swasta Belanda, yang dalam masyarakat kolonial statusnya lebih rendah dari status pegawai negeri. Di sebelah pojok barat laut alun-alun, di seberang Kantor Asisten Residen terdapat kamar bola, sebuah klub orang-orang Belanda. Bangunan yang ada di sekeliling alun-alun itu, antara lain rumah sakit, tempat tinggal pejabat penting Belanda seperti pegawai pajak, hakim dan sebagainya. Pada jalan utama di sekitar alun-alun terdapat aktivitas komersial, dan terdapat pula Kampung Cina yang cukup padat di sekitar pasar yang kebanyakan terdiri dari toko-toko kecil dan pengrajin.



Gambar 2.6 Tipologi kota/kabupaten di Jawa
(Handinoto, 1996: 20).

2.2.2 Pola struktur kota-kota pesisir dan pedalaman Jawa

Bentuk-bentuk awal kota Indonesia yang berbasis agraris diindikasikan merupakan manifestasi dari gagasan simbol dari bentuk kosmologis. Morfologi awal dari komposisi kota menunjukkan bentuk lingkaran memusat dengan inti elemen penting seperti keraton dan candi yang dikelilingi rumah bangsawan dan pemimpin agama (Hariyani, 2000: 2). Struktur morfologi kota mencerminkan ide religi yang menggambarkan adanya empat titik utama dengan satu pusat yang ditentukan sesuai aturan khusus dan disituasikan pada sudut-sudut suatu *square* persegi dengan garis utama membujur utara-selatan sebagai pengelompokkan daerah keraton raja dan keraton putra mahkota.

Sesuai dengan letak geografisnya, Pulau Jawa dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu kota pantai/pesisir dan pedalaman. Kota pantai digunakan sebagai penyalur komoditi ke luar pulau dan luar negeri, sedangkan kota pedalaman berfungsi sebagai kota penghasil produk pertanian. Kemakmuran kota-kota pesisir sangat tergantung pada

hubungan perdagangan dengan luar negeri, terutama hubungan perdagangan maritim. Struktur ekonomi kota-kota pesisir berorientasi keluar dan berbeda sekali dengan struktur kota pedalaman yang bersifat agraris pertanian dan berorientasi ke dalam (Santoso, 2008: 127).

Kota pedalaman yang sering disebut kota suci memiliki ciri keagamaan yang didominasi gagasan kosmologi, berpola sirkuler yang semakin menurun tingkat kesakralan dan statusnya dari pusat ke periferi. Perekonomian bergantung pada hasil pertanian, namun tetap memiliki hubungan dagang dengan kota pantai. Memiliki struktur morfologi kota agraris yang terdiri dari keraton, alun-alun, candi dan tempat tinggal berbagai tingkatan penduduk.

Kota pantai atau pesisir memiliki keanekaragaman karakter yang berfungsi sebagai tempat berlabuhnya para pedagang dan penduduk dari berbagai daerah, budaya dan kelompok etnis dan berciri kosmopolitan. Struktur morfologinya terdiri dari pelabuhan, keraton, alun-alun dan tempat tinggal berbagai kelompok penduduk (Hariyani, 2000: 3). Sejumlah kota pesisir yang masing-masing mempunyai bentuk kekuasaan *city-state* atau kota negara, secara umum merupakan bagian kerajaan yang bersifat heterogen dan kosmopolitan, dan cenderung ingin melepaskan diri dari dominasi politik, ekonomi, dan budaya pusat kerajaan di pedalaman (Santoso, 2008: 114).

Kota-kota di Pantai Utara Jawa lebih banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan kota di pedalaman karena adanya pengaruh budaya asing melalui perdagangan maritim yang berkembang. Sama halnya dengan alun-alun, sebagai pusat pemerintahan juga banyak mengalami perubahan sebagai akibat berbagai macam kegiatan yang dikarenakan kegiatan perdagangan.

Koesmartadi (1995, 53-63) dalam penelitiannya mengenai perubahan alun-alun dan sekitarnya di Kota Pantai Utara Jawa Tengah menemukan bahwa, alun-alun pada daerah pesisir pada umumnya berada di dekat sungai dan orientasi alun-alun ke arah utara atau menghadap ke panatai. Susunan ruang kawasannya terdiri dari pusat pemerintahan, alun-alun serta masjid. Letak pusat pemerintahan beragam mulai dari menempel alun-alun hingga menjorok masuk ke arah selatan. Bentuk dasar alun-alunnya juga beragam, baik yang berbentuk segi empat beraturan maupun yang tidak beraturan serta ada yang terdiri atas dua bagian. Letak pasar berada di sebelah utara alun-alun, karena hal ini terkait dengan kedekatannya dengan pelabuhan sebagai tempat terjadinya aktivitas perdagangan. Dibandingkan dengan model alun-alun Kota Gede,

maka jelaslah bahwa perletakan pasar yang ada di utara, tampaknya hanya berlaku pada Pesisir Utara Jawa, sedangkan pasar Kota Gede terletak di arah selatan keraton. Selain itu, Kartodirjo dalam Handinoto (1996: 23), juga mengungkapkan pada kota-kota pedalaman rumah bupati ada yang diletakkan di sebelah utara alun-alun (menghadap ke selatan), namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa hal tersebut dapat terjadi.

Pada abad ke-18, struktur kota mengalami perubahan morfologi seiring dengan masuknya pemerintahan Belanda yang menggantikan VOC dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara koloninya. Dominasi dan atau peleburan kekuasaan membawa pengaruh pada pembagian wilayah morfologi kota tradisional, yaitu adanya fungsi tambahan yang dibangun di sekitar alun-alun yang berfungsi sebagai tangsi, penjara, tempat tinggal warga eropa di timur alun-alun dan melebar ke utara (Hariyani, 2000: 2).

2.3 Karakteristik Kawasan Kota

2.3.1 Elemen pembentuk kawasan perkotaan

Wulandari (2002) dalam penelitiannya mengenai Studi Perkembangan Alun-alun Kota Semarang dalam mengidentifikasi kawasan alun-alun menggunakan beberapa variabel seperti: citra kawasan, tata guna lahan, sistem transportasi, penggunaan bangunan dan kegiatan pendukung kawasan. Lebih lanjut mengenai elemen citra kawasan, suatu kawasan terbentuk oleh lima elemen, yaitu sebagai berikut:

1. *Path* (jalur)

Path (jalur) adalah elemen yang paling penting dalam citra kota. *Path* merupakan rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan, gang-gang utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran dan sebagainya. *Path* mempunyai identitas yang lebih baik kalau memiliki tujuan yang besar (misalnya ke stasiun, tugu, alun-alun, dan lain-lain), serta ada penampakan yang kuat seperti *fasade*, pohon atau ada belokan yang jelas.

2. *Edge* (tepi)

Edge (tepi) adalah elemen linear yang tidak dipakai/dilihat sebagai *path*. *Edge* berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear, misalnya pantai, tembok, batasan antara lintasan kereta api, topografi, dan sebagainya. *Edge* merupakan pengakhiran dari sebuah *district* atau batasan sebuah *district* dengan yang lainnya. *Edge* memiliki identitas yang lebih baik jika kontinuitas tampak jelas batasnya. Demikian pula fungsi batasnya harus jelas antara membagi atau menyatukan.

3. *District* (kawasan)

District (kawasan) adalah merupakan kawasan-kawasan kota dalam skala dua dimensi. Sebuah kawasan *district* memiliki ciri khas yang mirip (bentuk, pola, dan wujudnya) dan khas pula dalam batasnya, dimana orang merasa harus mengakhiri atau memulainya. *District* mempunyai identitas yang lebih baik jika batasnya dibentuk dengan jelas tampilannya dan dapat dilihat homogen, serta fungsi dan posisinya jelas.

4. *Node* (simpul)

Node (simpul) merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis yang arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain, misalnya persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, kota secara keseluruhan dalam skala makro besar, pasar, taman, *square*, dan sebagainya. Tidak setiap persimpangan jalan adalah sebuah *node*, yang menentukan adalah citra *place* terhadapnya. *Node* adalah suatu tempat yang dapat membuat orang mempunyai perasaan 'masuk' dan 'keluar' dalam tempat yang sama. *Node* mempunyai identitas yang lebih baik jika tempatnya memiliki bentuk yang jelas (karena lebih mudah diingat), serta tampilan yang berbeda dari lingkungannya.

5. *Landmark* (tengaran)

Landmark (tengaran) merupakan titik referensi seperti elemen *node*, tetapi orang tidak masuk ke dalamnya karena bisa dilihat dari luar letaknya. *Landmark* adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kota, misalnya gunung atau bukit, gedung tinggi, menara, tanda tinggi, tempat ibadah, pohon tinggi, dan sebagainya. Beberapa *landmark* hanya mempunyai arti di daerah kecil dan dapat dilihat hanya di daerah itu, sedangkan *landmark* lain mempunyai arti untuk keseluruhan kota dan bisa dilihat dari mana-mana. *Landmark* adalah elemen penting dari bentuk kota karena membantu orang untuk mengorientasikan diri di dalam kota dan membantu orang mengenali suatu daerah. *Landmark* mempunyai identitas yang lebih baik jika bentuknya jelas dan unik dalam lingkungannya.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Hardiyanto (1993) mengenai Konservasi dan Pengembangan Lingkungan Alun-alun Kota Yogyakarta, untuk mengidentifikasi kawasan alun-alun dapat digunakan beberapa variabel seperti: status penggunaan lahan dan bangunan, fisik kawasan (tapak, vegetasi, batas, lintasan, simpul, tempat parkir, pedestrian dan *landmark*), serta fisik bangunan.

Selain itu, hampir sama dengan kedua pendapat diatas Fuady (2001: 43), menyebutkan unsur-unsur pembentuk lingkungan binaan yang perlu mendapat perhatian dalam membangun identitas suatu lingkungan atau kawasan perkotaan adalah:

- Bentuk dan massa bangunan beserta dengan fungsinya;
- Ruang luar yang terbentuk;
- Sirkulasi (kendaraan dan pejalan kaki) serta kondisi perparkiran;
- Penghijauan dan masalah ekonomi pada umumnya;
- Unsur penunjang lainnya, berupa papan reklame dan sarana prasarana beserta utilitas kota; dan
- Unsur non fisik yang membentuknya.

Pertumbuhan bagian kota berawal dari berlangsungnya suatu aktivitas pada elemen-elemen inti yang kemudian menimbulkan elemen-elemen baru berupa elemen tambahan yang merupakan pendukung elemen inti. Diantara elemen-elemen kota tersebut terdapat elemen inti yang selalu ada dan terdapat elemen yang tidak begitu penting yang mudah berubah serta terbuka untuk digantikan oleh kehadiran elemen baru.

2.3.2 Permasalahan dan kerusakan kawasan perkotaan

Gallion & Eisner (1996: 133-135), menyebutkan bahwa tingkat kritis dalam proses menuanya daerah perkotaan timbul dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada suatu wilayah. Kerusakan-kerusakan yang terjadi diantaranya berupa:

1. Kerusakan struktural

Kerusakan struktural didefinisikan sebagai kondisi rancangan fisik kota/ kawasan yang buruk, pengaturan ruang luar dan dalam yang salah akibat kondisi kepadatan penduduk yang terlalu tinggi. Selain itu, kurangnya penyediaan ventilasi, cahaya, sanitasi, dan ruang terbuka. Kondisi ini menyebabkan keusangan, kemunduran, kerusakan dan percampuran penataan bangunan.

2. Kerusakan ekonomi

Kerusakan ekonomi adalah hak milik yang menderita pergeseran lokasi ekonomi, kemunduran atau tidak dipergunakan karena beberapa faktor sebagai berikut:

- Pergeseran lokasi ekonomi, kerusakan atau tidak dipergunakan karena perencanaan yang salah;
- Subdivisi kawasan dan penjualan persil yang tidak teratur dan luas yang tidak cukup untuk penggunaan dan pengembangan yang baik;

- Peletakkan persil tanpa melihat topografi, fisik lahan dan kondisi sekitarnya;
- Kurangnya prasarana, fasilitas umum, ruang terbuka, utilitas yang tidak dapat diperbaiki oleh tindakan swasta maupun pemerintah tanpa perencanaan;
- Adanya penurunan nilai, investasi yang tidak memadai, serta ketidaksesuaian sosial ekonomi; dan
- Keberadaan persil atau kawasan lain yang terkena bahaya banjir, sedangkan unsur yang terdapat di dalamnya seharusnya dilestarikan.

Selain kerusakan-kerusakan tersebut, masalah lingkungan perkotaan juga terjadi dalam bentuk kemunduran kawasan yang ditandai dengan adanya kerusakan sistem jaringan/ infrastruktur, kondisi utilitas yang tidak memadai dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan seperti penurunan pada:

- Kualitas fungsional;
- Kualitas visual
Permasalahan yang menyangkut kualitas visual antara lain dengan adanya kerusakan kondisi fisik bangunan, penurunan kualitas estetika terkait proporsi, keseimbangan, skala dan pola ruang, serta ketidakjelasan hubungan antar ruang perkotaan; dan
- Kualitas lingkungan
Permasalahan lingkungan yang terjadi diantaranya dalam bentuk fisik dan sosial. Permasalahan lingkungan fisik antara lain berupa polusi dan kerusakan ekosistem, sedangkan permasalahan lingkungan sosial antara lain berupa hilangnya rasa identitas, yaitu rasa komunitas dan rasa memiliki.

2.4 Tinjauan Tentang Pelestarian

2.4.1 Pengertian pelestarian

Danisworo (1995: 3), menggunakan istilah pelestarian sebagai konservasi, dengan definisi bahwa konservasi adalah upaya untuk melestarikan, melindungi serta memanfaatkan sumber daya suatu tempat. Konservasi juga merupakan upaya preservasi, namun tetap memanfaatkan kegunaan dari suatu tempat untuk menampung/memberi wadah bagi kegiatan yang sama seperti kegiatan asalnya atau bagi kegiatan yang sama sekali baru, sehingga dapat membiayai sendiri kelangsungan eksistensinya. Serupa dengan pendapat Danisworo, Pontoh (1992: 36), mengemukakan bahwa konservasi merupakan upaya melestarikan dan melindungi, sekaligus memanfaatkan sumber daya

suatu tempat dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya;

Budihardjo (1997: 182), menyatakan bahwa konsep konservasi atau pelestarian bersifat dinamis, dengan cakupan yang luas. Sasaran tidak hanya terbatas pada objek arkeologis saja, melainkan meliputi karya arsitektur lingkungan atau kawasan dan bahkan kota sejarah. Konservasi merupakan istilah yang menjadi payung dari segenap kegiatan pelestarian lingkungan binaan, yang meliputi preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi. Konservasi sebagai wujud pelestarian merupakan kesinambungan yang bertujuan untuk tetap memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan modern dan kualitas hidup yang lebih baik (*the total system of heritage conservation*). Dalam pelestarian objek yang dikelola tidak lagi bangunan individual atau kelompok bangunan namun area atau kota secara keseluruhan (Adhisakti, 2001).

Berdasarkan beberapa konsep pelestarian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan pelestarian dalam studi ini adalah seluruh upaya/tindakan untuk memelihara, mengamankan, dan melindungi sumber daya yang ada pada suatu tempat, baik fisik maupun non fisik (budaya) dengan adaptasi terhadap fungsi baru, tanpa menghilangkan makna kehidupan budaya, sehingga dapat melangsungkan eksistensinya.

2.4.2 Bentuk-bentuk pelestarian

Dalam penelitiannya mengenai Revitalisasi Identitas Kota Tuban, Hartono & Handinoto (2005) mengungkapkan, revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tuban dilakukan dengan beberapa upaya seperti perbaikan atau pembangunan kembali bangunan-bangunan yang telah mengalami kerusakan dengan beberapa elemen tambahan (renovasi). Selain itu, untuk tetap mempertahankan identitas kawasan, ada beberapa bagian bangunan yang dipertahankan seperti bagian depan bangunan (adaptasi).

Serupa dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanto (1993) mengenai Konservasi dan Pengembangan Lingkungan Alun-alun Utara Yogyakarta, memberikan arahan konservasi berupa renovasi dan rehabilitasi/adaptasi dengan memperbaiki material *eksterior* maupun *interior* bangunan. Adapun penelitian lain mengenai Studi Pelestarian Kawasan Ampel Kota Surabaya yang dilakukan oleh Rakhmawati (2005), dalam penelitian tersebut direkomendasikan arahan pelestarian

kawasan berupa preservasi, konservasi dan rehabilitasi berdasarkan makna kultural bangunan yang ada di dalamnya. Dari beberapa wacana tersebut, lebih jelas mengenai bentuk-bentuk pelestarian diungkapkan oleh Attoe *dalam* Catanese (1986: 401-408), sebagai berikut:

a. Restorasi

Restorasi merupakan bentuk pelestarian yang paling konservatif, yang menyangkut pengembalian bangunan-bangunan pada kondisi orisinilnya. Restorasi mencakup penggantian unsur-unsur yang telah hancur dan pembuangan elemen-elemen yang telah ditambahkan. Pada intinya membebaskan secara keseluruhan dari lingkungan-lingkungan sekitarnya yang tidak harmonis, untuk melestarikan keindahan dan daya tarik bangunan-bangunan dan taman-taman serta arti sejarahnya. Kesulitan dalam restorasi selain terkait faktor keaslian dan biaya juga dalam memutuskan ke periode waktu mana bangunan tersebut akan dikembalikan.

b. Rehabilitasi dan renovasi

Rehabilitasi dan renovasi adalah strategi-strategi yang dipergunakan untuk membuat bangunan-bangunan tua menjadi dapat dipergunakan lagi. Bangunan yang memburuk perlu direhabilitasi sedemikian rupa supaya terus berguna. Rehabilitasi dan renovasi memungkinkan runag gerak yang lebih besar dalam hubungan dengan ketepatan daripada restorasi. Dalam kegiatan rehabilitasi dan renovasi dapat dilakukan upaya adaptasi. Upaya adaptasi muncul karena terkadang tujuan pelestarian seringkali bertentangan antara menyelamatkan masa lampau, namun mengadaptasikan dengan masa depan. Adaptasi biasanya dilakukan melalui perlakuan yang berbeda pada bagian luar dan bagian dalam bangunan.

c. Konservasi

Pada dasarnya tujuan konservasi hanya melestarikan apa yang ada sekarang dan mengarahkan perkembangan di masa depan. Konservasi dipergunakan untuk menjaga agar tempat-tempat yang menarik dan dapat dipakai tidak dihancurkan atau dirubah dengan cara yang kurang sesuai. Meskipun tujuan umum kawasan konservasi terutama adalah pelestarian bangunan-bangunan fisik pusat kota dan secara lebih tepatnya bentuk-bentuk arsitektur, namun kadang-kadang ada tujuan yang lebih spesifik, yaitu stabilisasi penduduk dan gaya hidup yang serasi, yakni pencegahan perubahan sosial.

d. Replikasi

Imitasi atau replikasi tidak dipergunakan secara luas pada skala kota, namun sesuai untuk beberapa situasi, misalnya dalam situasi penghancuran sama sekali,

pembangunan baru yang meniru bangunan yang ada sebelumnya kadang-kadang merupakan suatu kebijaksanaan yang dapat diterapkan. Jenis imitasi yang lain dipergunakan bila ada suatu kebutuhan untuk mengisi celah-celah antar bangunan yang ada. Bila suatu kawasan sejarah mempunyai suatu sifat arsitektural, maka kadang-kadang disyaratkan bahwa pembangunan-pembangunan baru meniru unsur-unsur atau bentuk-bentuk bangunan yang sudah ada, sehingga bangunan-bangunan baru itu tidak akan merusak.

e. Relokasi

Relokasi tidak dipergunakan secara luas, namun dalam beberapa keadaan, pemindahan bangunan dari satu lokasi ke lokasi lain bisa dibenarkan. Upaya ini dilakukan dengan rencana untuk membuat kawasan yang memang direncanakan untuk mawadahi berbagai objek pelestarian. Disamping pada lokasi semula, kondisi lingkungan sudah sangat berubah dari kondisi awal akibat perkembangan fisik yang tidak terencana.

Adapun istilah bentuk-bentuk pelestarian lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Preservasi

Upaya pelestarian untuk melindungi bangunan, monumen dan lingkungan dari kerusakan serta mencegah proses kerusakannya. Dalam Piagam Burra disebutkan bahwa preservasi adalah pemeliharaan suatu tempat persis menjadi seperti aslinya dan mencegah proses kerusakannya. Apabila dilihat dari tulisan-tulisan yang ada para ahli sepakat bahwa preservasi merupakan payung dari semua kegiatan pelestarian.

2. Rekonstruksi

Upaya pelestarian dengan mengembalikan atau membangun suatu tempat semirip mungkin dengan keadaan semula yang diketahui dengan menggunakan bahan baru maupun lama.

3. Demolisi

Upaya ini lebih didasari oleh faktor keamanan dengan merobohkan objek pelestarian/bersejarah karena secara fisik sudah sangat membahayakan.

Pada tabel 2.4 di bawah ini digambarkan mengenai tingkat perubahan dari masing-masing kegiatan pelestarian.

Tabel 2.4 Jenis Kegiatan Pelestarian dan Tingkat Perubahan

No.	Kegiatan	Tingkat Perubahan			Total
		Tidak ada	Sedikit	Banyak	
1	Preservasi	*			
2	Konservasi	*	*	*	*
3	Restorasi dan Rehabilitasi		*	*	

Lanjutan Tabel 2.4

No.	Kegiatan	Tidak ada	Tingkat Perubahan		Total
			Sedikit	Banyak	
4	Renovasi		*	*	
5	Rekonstruksi			*	*
6	Adaptasi/Revitalisasi		*		*
7	Demolisi				*

Sumber : Lynch, 1960: 46-90

2.4.3 Skala kegiatan pelestarian

Adapun menurut Sidharta & Budihardjo (1989: 11-12), skala/lingkup pelestarian dalam suatu lingkungan kota, objek, digolongkan dalam beberapa luasan sebagai berikut:

- Satuan areal, adalah satuan yang dapat berwujud sub wilayah kota.
- Satuan pandangan, adalah satuan yang dapat mempunyai arti dan peran yang penting bagi suatu kota. Satuan ini berupa aspek visual yang dapat memberi bayangan mental atau *image* yang khas tentang suatu lingkungan kota.
- Satuan fisik, adalah satuan yang berwujud bangunan, kelompok atau deretan, rangkaian bangunan yang membentuk ruang umum atau dinding jalan.

Dalam penelitian pelestarian Kawasan Alun-alun Kota Malang, skala pelestariannya berupa satuan pandangan, yaitu Kawasan Alun-alun Kota Malang yang berupa ruang terbuka yang dibatasi oleh bangunan, sehingga memberikan kesan tertentu pada wilayah pusat Kota Malang.

2.4.4 Motif-motif pelestarian

Terdapat beberapa alasan atau motif dalam kegiatan pelestarian, diantaranya (Catanese & Snyder, 1986: 420-422):

- Melindungi warisan kita;
- Menjamin variasi dalam bangunan perkotaan;
- Ekonomis; dan
- Simbolis.

Penelitian ini mengangkat tema pelestarian pada Kawasan Alun-alun Kota Malang yang didasarkan pada motif untuk melindungi warisan kota, melindungi bangunan-bangunan bersejarah dan bangunan khas, mempertahankan simbolisasi dan tetap mendukung upaya peningkatan ekonomi.

2.4.5 Penentuan objek pelestarian

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Rakhmawati (2005) dan Hardiyanto (1993), dalam menentukan objek pelestarian digunakan beberapa kriteria seperti: estetika, kejamakan, memperkuat citra kawasan, peranan sejarah, kelangkaan dan keistimewaan.

1. Estetika

Bangunan yang memiliki prestasi khusus dalam suatu gaya sejarah tertentu.

2. Kejamakan

Bangunan-bangunan yang tidak istimewa sebagai contoh-contoh desain arsitektur juga dilestarikan sebagai wakil dari satu kelas atau jenis khusus bangunan.

3. Kelangkaan

Bangunan yang hanya satu dari jenisnya atau yang merupakan contoh terakhir yang masih ada dari suatu bangunan.

4. Keluarbiasaan

Bangunan yang dianggap sebagai landmark yang kan membantu orang dalam mengenali suatu kawasan

5. Peranan sejarah

Bangunan dan lingkungan yang merupakan lokasi bagi peristiwa bersejarah, penting dilestarikan untuk memberikan suatu kaitan simbolis antara peristiwa terdahulu dan peristiwa yang ada sekarang.

6. Memperkuat kawasan di dekatnya

Terkadang bangunan atau kelompok bangunan karena investasi di dalamnya akan mempengaruhi kawasan-kawasan yang ada di dekatnya.

Gaya bangunan mempengaruhi nilai kejamakan, keluarbiasaan serta memberi pengaruh untuk memperkuat kawasan. Adapun beberapa tinjauan gaya bangunan yang dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Gaya Bangunan Tradisional Jawa

Adapun ciri-ciri bangunan tradisional Jawa, diantaranya (Bappeko, 2005):

- Komposisi fasade simetris dengan ragam hias flora dan fauna
- Bentuk bangunan geometri segiempat dengan atap berbentuk kampong, limasan atau joglo
- Material lokal yang diambil dari bahan alam (kayu, batu dsb)
- Orientasi bangunan ke arah selatan

- Denah berbentuk bujursangkar atau empat persegi panjang dengan penerapan konsep simetri yang dipengaruhi konsep sumbu
 - Struktur rangka kayu dengan sistem bongkar pasang dan dinding sebagai batas
2. Gaya Bangunan Neoklasik Eropa

Gaya bangunan ini memiliki ciri-ciri berukir, bergaya kuno, tidak dicat atau dikapur polos berwarna putih mentah atau sejenisnya. Adapun cirinya, yaitu sebagai berikut:

- Bangunan yang serupa dengan bangunan di Eropa dalam abad ke-18 dan abad ke-19
- Vertikalitas dan monumentalitas menjadi kesan tampilan yang begitu dominan yang dikerjakan dengan ketepatan aturan neoklasik yang cukup tinggi dan cermat
- Unsur-unsur bentukan yang merupakan respon dari iklim tropis dan budaya Indonesia sama sekali tidak ditemukan pada bangunan ini

3. Gaya Bangunan Belanda Klasik

Merupakan gaya yang banyak digunakan pada bangunan rumah tinggal Belanda dengan beberapa corak bangunan seperti:

a. *Indische Empire Sytle*

Ciri bangunan dengan gaya *Indische Empire Stle* antara lain:

- Penggunaan atap bentuk perisai
- Berkesan monumental
- Memiliki halaman yang luas
- Bangunan umumnya terdiri dari beberapa bangunan, yang dihubungkan oleh serambi atau selasar
- Denah simetris
- Serambi muka dan belakang terbuka dan terdapat pilar batu yang tinggi bergaya Yunani
- Terdapat koridor tengah sebagai penghubung antar ruang dan serambi
- Terdapat round-roman arch pada gerbang masuk atau koridor pengikat antar masa bangunan
- Penggunaan lisplank batu bermotif klasik di sekeliling atap
- Wajah bangunan berpola simetris mengikuti bentuk denah

Elemen yang memperkuat gaya *Indische Empire Sytle* antara lain adalah bentukan kolom dan material pembentuknya, detail entrance dan detail atap. Elemen horisontal menjadi unsur dominan dalam bangunan dibandingkan dengan unsur vertikalnya.



Gambar 2.7 Gaya Bangunan Indische Empire Sytle
(Sumber: Nix, 1994:268).

b. Voor 1900

Gaya bangunan ini memiliki cirri-ciri antara lain:

- Bangunannya tidak bertingkat
- Beratap perisai
- Memiliki halaman yang luas, memiliki bangunan utama dan beberapa bangunan penunjang
- Denahnya simetris, memiliki serambi muka dan belakang yang terbuka serta terdapat koridor tengah yang menghubungkan antar serambi sekaligus menghubungkan ruang tidur dan ruang-ruang lainnya
- Menggunakan bahan material dari besi dan elemen-elemen lain untuk beradaptasi dengan iklim tropis



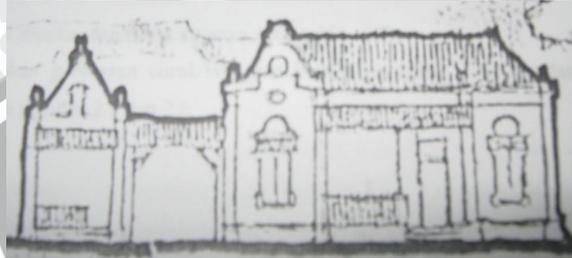
Gambar 2.8 Gaya Bangunan Voor 1900
(Sumber: Nix, 1994:268).

c. NA 1900

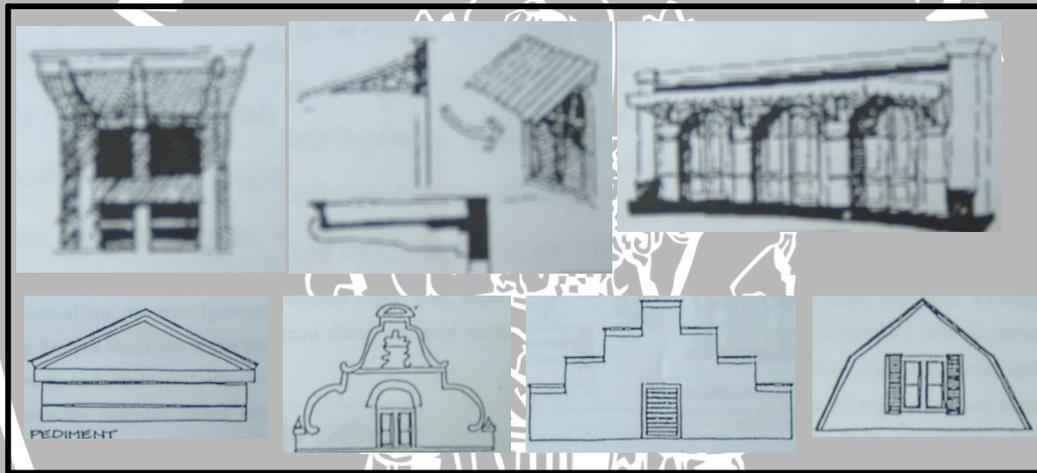
Gaya bangunan ini memiliki cirri-ciri antara lain:

- Tampak bangunan utama asimetris, namun denah relatif masih simetris
- Serambi muka terbuka memanjang

- Kolom menghilang atau mengecil
- Denahnya menonjol sampai bidang muka bangunan
- Terdapat gevel pada bangunan induk maupun bangunan penunjang
- Terdapat teritis seng gelombang, variasi mahkota batu pada bagian ujung-ujung gevel dan tepi lisplank beton, dan terdapat penambahan balustrade (pagar) besi atau batu pada serambi



Gambar 2.9 Gaya Bangunan NA 1900
(Sumber: Nix, 1994:268).



Gambar 2.10 Model Kanopi dan Gevel Bangunan Kolonial
(Sumber : Handinoto,1996: 167).

d. Romantiek

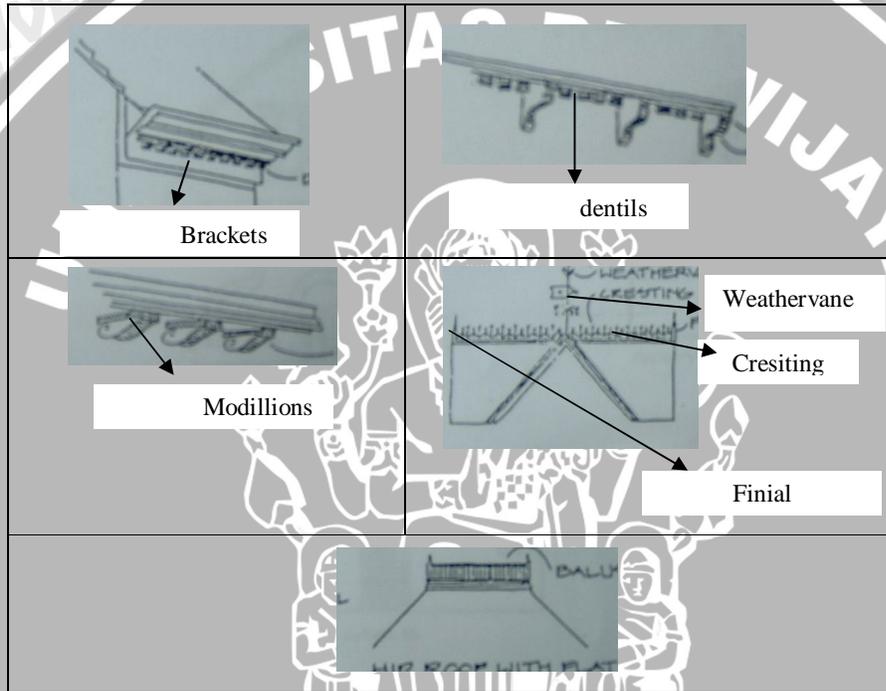
Gaya bangunan ini memiliki cirri-ciri antara lain:

- Penambahan elemen dekoratif yang lebih banyak hampir di seluruh bagian bangunan dan elemen ruang luar
- Bentuk lengkung banyak dipakai dan sudut atapnya antara $45^{\circ} - 60^{\circ}$.
- Penutup atap dari genteng



Gambar 2.11 Gaya Bangunan Romantiek
(Sumber: Nix, 1994:268).

Variasi detail bangunan dengan arsitektur Modern-Romatik dapat dilihat pada gambar berikut.

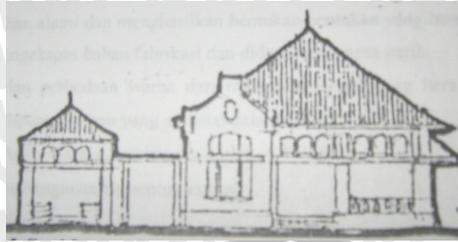


Gambar 2.12 Variasi Detil Pada Arsitektur Modern-Romatik
(Sumber: Handinoto, 1996: 178).

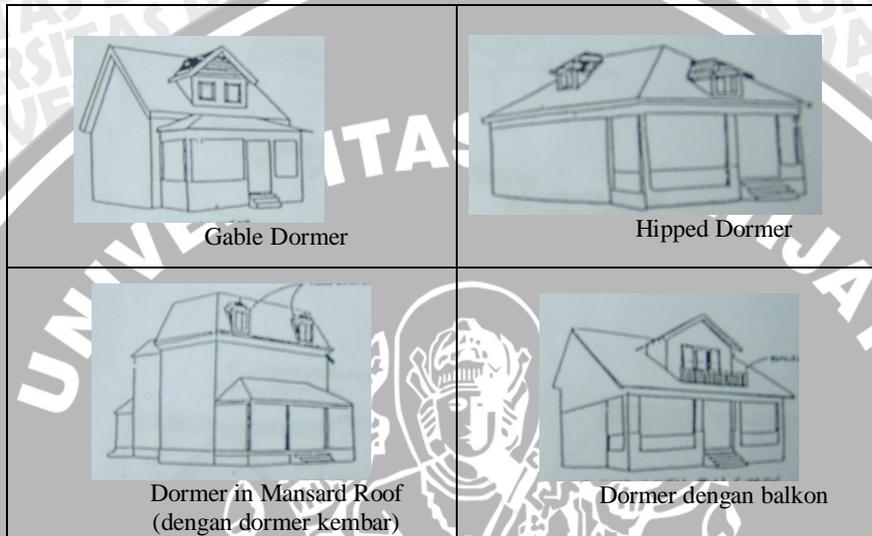
e. Kolonial Tahun 1915-an

Gaya bangunan ini memiliki cirri-ciri antara lain:

- Penggunaan plat beton pada teritis dan koridor penghubung bangunan
- Elemen dari besi cor semakin berkurang
- Detail dekoratif banyak berkurang
- Variasi mahkota pada atap umumnya hanya pada bagian ujung pertemuan bubungan dan jurai
- Atapnya tinggi dengan penggunaan genteng sebagai bahan penutupnya
- Penggunaan elemen vernacular Belanda seperti: *tower* pada bagian muka bangunan, *dormer*, *louver* yang terdapat pada kemiringan atap utama



Gambar 2.13 Gaya Bangunan Kolonial tahun 1915-an
(Sumber: Nix, 1994:268).



Gambar 2.14 Variasi Bentuk Dormer Bangunan Kolonial
(Sumber: Handinoto, 1996: 176).

4. Gaya bangunan Modern

a. *Artdeco*

Sumalyo (1997: 491), mengungkapkan bahwa pada awal abad XX muncul aliran *Art Deco* yang diterapkan dalam bentuk bangunan, terutama dekorasi dengan bentuk-bentuk geometris dan komposisi yang tidak merupakan abstraksi dari bentuk-bentuk tertentu. Kata *Art Deco* berasal dari Bahasa Inggris yang secara bebas dapat diartikan sebagai gaya seni dekorasi bangunan yang populer pada tahun 1920-1930-an, dengan karakteristik garis-garis lugas yang teratur dan garis-garis panjang yang mengalir tidak terputus, serta memanfaatkan plastik sebagai salah satu material bangunan. Bangunan *Art Deco* adalah bangunan yang memiliki seni hias pada bentuk bangunannya, hiasan yang dipakai biasanya berupa seni desain kontemporer modern, dengan pemanfaatan unsur dekoratif yang sangat kental pada fasade bangunan.

Beberapa pendapat mengatakan bangunan bergaya *Art Deco* di Indonesia biasanya juga dikenal sebagai bangunan Indis. Arsitektur *Art Deco* merupakan gaya

yang mengutamakan hiasan-hiasan tradisional setempat, tetapi langgam ini tetap terbuka untuk menerima pengaruh dari aliran-aliran modern yang berkembang saat itu. Hal ini mengandung pengertian bahwa gaya *Art Deco* dapat beradaptasi dengan lingkungan, aliran maupun zamannya, sehingga tidak mengeherankan apabila tahun 1960-1970-an gaya *Art Deco* bangkit lagi di Indonesia.

Sekitar tahun 1960-1980-an dan tahun 1985-2005, bangunan *Art Deco* bangkit lagi di Indonesia, sehingga menurut perkembangan konsepsi atau unsur dekoratif dan teknologi yang dipakai serta tahun kemunculannya, perkembangan bangunan *Art Deco* di Indonesia dapat dibagi dalam empat periode, yaitu: (1) periode *Art Deco and The Amsterdam School* (tahun 1910-1920), (2) periode *Art Deco/Decoratif Art* (tahun 1920-1930), (3) periode *Late Art Deco/Streamline* (tahun 1930-1950), dan (4) periode bangunan *Art Deco* setelah kemerdekaan, yang dibangun sekitar tahun 1960-2005 (Indartoyo, 2008: 6).

I. *Periode Art Deco* (tahun 1910-1920)

Pada periode ini dekorasi atau hiasan yang muncul pada fasade bangunan lebih banyak berupa garis-garis pendek yang diatur secara vertikal atau horizontal dengan ritme yang teratur dan biasanya dibuat simetri.

II. *Periode Decoratif Art* (tahun 1920-1930)

Pada periode ini muncul bangunan dengan fasade bangunan yang menampilkan motif ragam hias modern dengan inspirasi bentuk-bentuk dan elemen-elemen candi Hindu-Jawa.

III. *Periode Late Art Deco/Streamline* (tahun 1930-1950)

Pada periode ini muncul bangunan bergaya *Art Deco* yang selain memakai menara atau bagian bangunan yang ditinggikan, juga didesain bentuk jendela, lubang anging dan oversteknya yang diatur secara horizontal memanjang, sehingga membentuk *streamline* yang dominan pada fasade bangunannya.

IV. Periode bangunan *Art Deco* setelah kemerdekaan, yang dibangun sekitar tahun 1960-2005. Perkembangan bangunan *Art Deco* pada periode ini pada prinsipnya mempunyai tipologi yang sama dengan periode 1920-1940 tetapi dengan proporsi (menara atau fasade) yang berbeda. Dengan pertimbangan faktor iklim tropis yang ada di Indonesia, maka pola-pola vertikal pada fasade bangunan yang lama dieliminir dengan garis-garis horizontal yang selain berfungsi sebagai elemen dekorasi juga sebagai elemen untuk menahan terpaan air hujan dan panas matahari langsung.



Gambar 2.15 Contoh Bangunan Bergaya Art Deco di Indonesia
(Vila Isolia, Hotel Homann Bandung)
(Sumber: <http://bandung.petawisata.com>).

b. *Amsterdam School*

Kehadiran gaya *Art Deco* seiring dengan munculnya gerakan arsitektur modern seperti *Amsterdam School* dan *De Stijl*. *Amsterdam School* menitikberatkan pada orisinalitas dan alamiah dimana peranan arsitektur vernacular masih cukup besar, sementara *De Stijl* lebih menitikberatkan pada fungsi. Adapun ciri gaya bangunan *Amsterdam School*, antara lain (Karisztia, 2008: 27):

- Menitikberatkan pada orisinalitas dan berkesan natural
- Material yang digunakan merupakan material alam
- Bentuk bersifat massif dan plastis
- Ornamentasi bersifat skulptural dan perbedaan warna material beragam
- Bentuk atap lebih runcing dengan kemiringan antara 45° – 60°
- Wajah didominasi oleh pola lengkung dan organik
- Konstruksi batu bata, massing tradisional dan integrasi antara keseluruhan skema elemen bangunan yang menandai dan mengekspresikan bangunan
- Memiliki tujuan untuk menyatukan arsitektural, interior dan eksterior yang membawa makna sosial

c. *De Stijl*

Pengaruh aliran *De Stijl* dari Belanda yang menyuguhkan konsep arsitektural “kembali ke bentuk yang sederhana” dan pengkomposisian bentuk-bentuk sederhana menghasilkan pencahayaan dan bayangan yang menarik. *De Stijl* dikenal juga dengan nama *neoplasticism*. *De Stijl* sedikit banyak terpengaruh oleh gaya *cubism*. Beberapa bangunan bergaya *De Stijl* diantaranya hasil karya FJL Ghijsels dan Nedam yang sangat dipengaruhi dengan pola garis-garis dan asimetrisitas. Ghijsels merancang hotel Internatio, sementara Nedam adalah perancang kantor Gubernur Jawa Timur di daerah Tugu Pahlawan. Contoh bangunan dengan gaya *De Stijl* di Kota Malang adalah bangunan stasiun kereta api, Gedung PLN, gedung kembar

lama di perempatan Kayutangan (Bank ANK dan Pitt Stop), dan Toko Avia.

Adapun ciri gaya bangunan *De Stijl*, antara lain:

- Menitikberatkan pada fungsi
- Permainan volume bangunan kubus yang dimaksudkan untuk mengekspresikan keplastisan secara keseluruhan
- Material dasar yang digunakan merupakan hasil fabrikasi
- Gevel horisontal tanpa pemberian dekorasi apapun
- Lepas dari permainan warna, dimana bangunan biasanya didominasi oleh warna putih
- Komposisi elemen vertikal masih dominan pada bagian kepala bangunan, sedangkan elemen horisontal bangunan dipengaruhi oleh denah yang terkesan moduler
- Detail wajah tidak terlalu dominan



Gambar 2.16 Contoh Bangunan Bergaya De Stijl di Indonesia

(Bioskop Megaria Jakarta & Stasin Kota Malang)

(Sumber: <http://fabolousse7entd1.files.wordpress.com>).

d. *Nieuwe Bouwen*

Adapun gaya bangunan modern lainnya yang pernah berkembang di Indonesia, yaitu gaya bangunan modern *Nieuwe Bouwen*. Gaya seperti ini menjadi tren pada tahun 1930-an hingga 1950-an. Arsitektur *Nieuwe Bouwen* merupakan istilah gaya bangunan sesudah tahun 1920-an yang merupakan penganut dari aliran *International Style*. Gaya arsitektur ini dibarengi oleh pengaruh gaya arsitektur modern yang sedang tren pada masa itu antara lain: *Amsterdam School* dan *De Stijl* yang berkembang di Indonesia karena semakin banyak arsitek Belanda beraliran arsitektur modern berpraktek di Indonesia seperti HP. Berlage, C. Citroen, Th. van Oyen dan CP. Wolff Schoemaker adalah beberapa di antaranya. Adapun cirri-cirinya, yaitu sebagai berikut (Handinoto, 1996: 203):

- Berwarna putih
- Beratap datar

- Gevel horisontal
- Volume bangunan berbentuk kubus
- Penggunaan beton sebagai material utama
- Fasade yang sederhana dengan garis-garis horisontal yang keras
- Jendela-jendela geometris tanpa ornament
- Permainan massa bangunan yang plastis yang ditingkahi oleh adanya menara, namun pada umumnya menara tersebut tidak fungsional, hanya merupakan bentukan massa vertikal yang mengimbangi garis-garis horizontal yang kuat pada tampak bangunan.

Selain makna kultural, kriteria lain yang dapat digunakan dalam mempertimbangkan objek yang akan dilestarikan diantaranya, yaitu

1. Nilai (value) dari objek; mencakup nilai estetika, berdasarkan pada kualitas bentuk maupun detailnya. Suatu objek dengan nilai keunikannya dan suatu karya yang terdandang akan memiliki gaya dari suatu periode tertentu yang dapat digunakan sebagai objek konservasi.
2. Fungsi objek dalam lingkungan kota; berkaitan dengan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Objek merupakan bagian dari suatu kompleks bersejarah dan sangat berharga bagi kota, memberikan suatu *landmark* kota yang memperkuat karakter kota dan mempunyai nilai emosional bagi masyarakat kota tersebut.
3. Fungsi objek lingkungan sosial dan budaya; penetapan kriteria konservasi tidak terlepas dari keunikan kehidupan suatu lingkungan sosial tertentu, yang memiliki budaya atau tradisi yang kuat, dimana objek tersebut memiliki keterkaitan dengan fase perkembangan wujud budaya tersebut.

Suatu tempat dikatakan mempunyai makna bila dapat membantu memahami masa lalu, memperkaya masa kini, dan dapat menjadi nilai untuk generasi yang akan datang. Menurut Fielden *dalam* Prasetya, (2008: 3), konservasi haruslah menekankan dan memberikan perhatian dan peningkatan pada nilai-nilai kultural masyarakat (*cultural property*). Nilai-nilai kultural yang terdapat dalam konservasi adalah:

1. Nilai emosional
Mencakup keindahan, kontinuitas, identitas spiritual dan simbolik serta hal-hal emosional yang menakjubkan

2. Nilai kultural
Berkaitan dengan dokumentasi, kesejarahan, arkeologikal, bagian dari kota, landscape atau ekologi, teknologi dan ilmu pengetahuan
3. Nilai guna (*use value*)
Meliputi kegunaan ekonomi, sosial dan politik/pemerintahan.

2.4.6 Tinjauan kebijakan pelestarian kawasan

A. UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

Pemerintah melalui presiden memandang perlu adanya penjagaan kelestarian benda cagar budaya karena hal itu merupakan salah satu aset yang penting bagi pemahaman, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan serta kebudayaan demi menumpuk kesadaran jati diri dan kepentingan nasional. Proses penentuan suatu bangunan, artefak, situs, kawasan, dan benda bersejarah lainnya termasuk dalam objek yang perlu dilestarikan, digunakan beberapa kriteria. Kriteria yang digunakan di Indonesia dalam menentukan objek bangunan yang akan dilestarikan diatur dalam Undang-undang Cagar Budaya No.5 Tahun 1992, adalah sebagai berikut:

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur 50 tahun, atau mewakili masa gaya arsitektur klasik sekurang-kurangnya 50 tahun; dan
2. Benda dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

B. Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2010

Berdasarkan Evaluasi/Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2010, rencana pemanfaatan ruang Kota Malang juga meliputi rencana pemantapan kawasan lindung dalam hal ini yang berkaitan dengan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

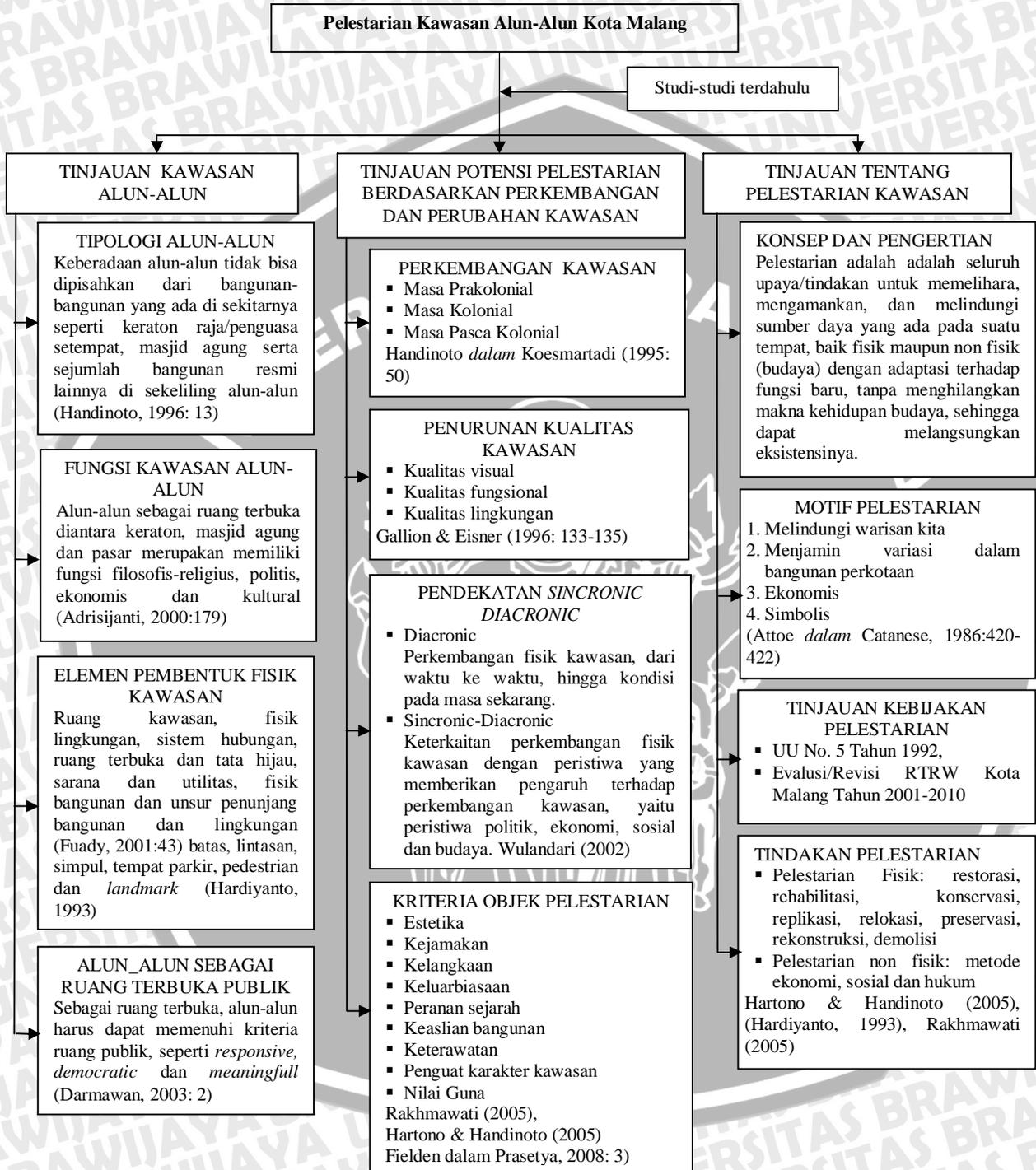
1. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dimaksud meliputi :
 - a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang berumur 50 tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 - b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

2. Terkait dengan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, benda cagar budaya yang perlu dilindungi di Kota Malang adalah :
- kawasan permukiman yang bernilai tinggi dari bentukan bangunan, bentukan kawasannya, maupun yang mempunyai nilai sejarah tinggi, seperti yang terdapat pada kawasan permukiman di jalan Ijen;
 - kawasan yang teridentifikasi mempunyai Benda Cagar Budaya (BCB) atau situs-situs sejarah sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, yaitu bangunan-bangunan umum yang mempunyai nilai sejarah tinggi dilihat dari bentukan bangunannya maupun sejarahnya yaitu antara lain terdapat pada bangunan Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, Gereja Kathedral Hati Kudus, Sekolah Cor-Jessu, Gedung PLN, dan lain sebagainya.



2.5 Kerangka Teori

Kerangka teori menjelaskan kajian pustaka/teori-teori yang akan digunakan dalam studi Pelestarian Kawasan Alun-alun Kota Malang.



Gambar 2.17 Kerangka Teori.

2.6 Studi Terdahulu/Penelitian Sejenis

Studi terdahulu terkait penelitian sejenis dapat dijadikan referensi sekaligus menjadi acuan dan perbandingan dalam proses identifikasi dan analisis yang akan dilakukan. Lebih jelas mengenai studi terdahulu/penelitian sejenis yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.5



Tabel 2.5 Studi-studi Terdahulu/Penelitian Sejenis

Peneliti	Judul	Lokasi Studi	Tujuan	Variabel/sub variabel	Metode	Hasil	Manfaat	Perbedaan
1. Wulandari (2002)	Studi Perkembangan Kawasan Alun-alun Kota Semarang	Kawasan Alun-alun Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi sejarah kawasan alun-alun Kota Semarang Menganalisis perkembangan kawasan alun-alun Kota Semarang Menganalisis kawasan alun-alun Kota Semarang Menentukan arahan pengembangan kawasan alun-alun 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk fisik kawasan Fungsi kawasan Bangunan di sekitar kawasan Waktu berdirinya Fungsi kawasan Bangunan di sekitar kawasan Bentuk fisik bangunan dan lingkungan Aktivitas kawasan Citra kawasan Tata guna lahan Sistem transportasi Penggunaan bangunan Kegiatan pendukung kawasan Konsep pengembangan kawasan Alun-alun Kota Semarang yang didasarkan pada analisis sejarah perkembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis deskriptif Analisis dekriptif dengan metode <i>synchronik</i> - <i>diacronic</i> Analisis deskriptif Analisis deskriptif 	<p>Kawasan Alun-alun Kota Semarang telah ada sebelum masuknya kolonial Belanda dengan bangunan yang berupa <i>dalem</i> kadipaten, alun-alun dan masjid. Alun-alun berbentuk trapesium sama kaki, masjid berbentuk segi empat dengan perbandingan sisi bangunan 2:3 dan <i>dalem</i> kadipaten etrdiri dari 3 oetak lahan. Keberadaannya berkaitan dengan dua kegiatan, yaitu pusat pemerintahan dan penyebaran agama islam. Perkembangan kawasan Alun-alun terlihat dari perubahan fungsi kawasan, bangunan di sekitar kawasan dan aktivitas kawasan yang mengarah pada kegiatan ekonomi</p> <p>Kegiatan perdagangan menjadi fungsi utama kawasan yang mendominasi struktur tata ruang kawasan. Munculnya PKL sebagai kegiatan pendukung kawasan menyebabkan kawasan terkesan kumuh dan tidak teratur</p>	<ol style="list-style-type: none"> Variabel yang digunakan dalam mengidentifikasi perkembangan dan kawasan alun-alun dapat digunakan dalam penelitian Identifikasi sejarah kawasan perlu dimasukkan sebagai tahap awal perkembangan alun-alun Mengidentifikasi potensi pelestarian bangunan di kawasan alun-alun berdasarkan makna kultural dan fungsinya Konsep pengembangan difokuskan dengan memberikan arahan pelestarian pada kawasan alun-alun 	<ol style="list-style-type: none"> Identifikasi sejarah kawasan dimasukkan sebagai tahap awal perkembangan alun-alun Variabel untuk mengidentifikasi perkembangan alun-alun juga digunakan dalam identifikasi kawasan alun-alun Mengidentifikasi potensi pelestarian bangunan di kawasan alun-alun berdasarkan makna kultural dan fungsinya Konsep pengembangan difokuskan dengan memberikan arahan pelestarian pada kawasan alun-alun

Lanjutan tabel 2.5

Peneliti	Judul	Lokasi Studi	Tujuan	Variabel/sub variabel	Metode	Hasil	Manfaat	Perbedaan
				dan analisis kawasan serta mengacu pada rencana pengembangan kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota		angkutan 5. Menata, memperbaiki dan mempertahankan bangunan yang memiliki nilai sejarah 6. Menciptakan wisata budaya pada bangunan kuno 7. Penataan PKL 8. Mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengembangan kawasan		
2. Lisa Dwi Wulandari (2004)	Kajian Historis Perkembangan Kota Malang Dalam Menggali Makna Pembentukan Alun-alun Kota Malang	Alun-alun Merdeka dan Alun-alun Tugu (Bunder)	Mengidentifikasi makna dan proses pembentukan Alun-alun Merdeka dan Alun-alun Tugu dengan melihat proses perkembangan fisik Kota Malang	▪ Pola dan struktur kota	▪ Analisis deskriptif	▪ Penataan Alun-alun Kota Malang mengandung maksud dan tujuan tertentu dari pemerintah Belanda. Intervensi fisik pada penataan Alun-alun Merdeka bertujuan untuk menegaskan kekuasaan Belanda di Kota Malang, dan upaya tersebut dipertegas lagi dengan pembentukan pusat pemerintahan baru di Alun-alun Bunder. ▪ Alun-alun Merdeka berkembang sangat cepat dan perkembangannya relatif sulit dikendalikan serta didominasi aktivitas ekonomi. ▪ Alun-alun Tugu identik dengan kepentingan politis pemerintahan, bersifat pasif dan perkembangannya lebih mudah dikendalikan	1. Menjadi referensi dalam penelitian terkait makna pembentukan Alun-alun Merdeka Kota Malang 2. Wacana terkait perkembangan Alun-alun Merdeka menjadi referensi dalam identifikasi kronologis perkembangan alun-alun dalam penelitian yang akan dilakukan	1. Identifikasi perkembangan alun-alun secara kronologis mulai awal pembentukannya hingga kondisi terkini 2. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi pelestarian pada kawasan alun-alun 3. Menentukan arahan kawasan pelestarian alun-alun
3. Indah Rakhmawati (2005)	Studi Pelestarian kawasan Ampel Surabaya	Koridor KH. Mas Mansyur, Sasak, Nyamplungan dan Dana	▪ Mengidentifikasi karakter koridor kawasan	▪ Fisik : TGL, Kondisi bangunan dan sirkulasi ▪ Non fisik : sosial, budaya dan ekonomi	▪ Analisis deskriptif untuk TGL, kondisi bangunan, sosial,	▪ Karakter bangunan dan lingkungan sepanjang koridor perencanaan	1. Variabel dan metode dalam identifikasi objek pelestarian dapat digunakan dalam penelitian. 2. Variable tata guna	1. Tidak membahas permasalahan dalam pelestarian 2. Variabel non fisik dalam identifikasi kawasan alun-alun yang akan digunakan



Lanjutan tabel 2.5

Peneliti	Judul	Lokasi Studi	Tujuan	Variabel/sub variabel	Metode	Hasil	Manfaat	Perbedaan
		Karya			ekonomi dan budaya.		lahan dapat dimasukkan dalam identifikasi kawasan alun-alun	adalah aktivitas yang terjadi dalam kawasan alun-alun
			<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi bangunan kuno potensial berdasar kriteria makna kultural Mengidentifikasi permasalahan pelestarian Menentukan arahan pelestarian 	<ul style="list-style-type: none"> Estetika Kejamakan Memperkuat citra kawasan Peranan sejarah Kelangkaan Keluarbiasaan Aspek fisik Aspek ekonomi Aspek sosial Aspek hukum Pelestarian fisik Pelestarian non fisik 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis evaluatif dengan metode pembobotan dan skoring. Analisis deskriptif Metode developm ent dengan pembobotan 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bangunan yang potensial untuk dilestarikan sebanyak 43 bangunan Permasalahan yang terjadi, antara lain ketiadaan aturan hukum yang mengikat, kebijakan bantuan biaya dan minimnya rangsangan pemerintah untuk kesadaran pelestarian bangunan. Arahan pelestarian berupa preservasi, konservasi dan rehabilitasi berdasarkan makna kultural yang dimiliki bangunan bersejarah. 		
4.Arif Hardiyanto (1993)	Konservasi dan Pengembangan Lingkungan Alun-alun Utara Yogyakarta	Lingkungan Alun-alun Utara Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi lingkungan alun-alun utara 	<ul style="list-style-type: none"> Status penggunaan lahan dan bangunan Fisik kawasan: tapak, vegetasi, batas, lintasan, simpul, tempat parkir, pedestrian, landmark Fisik bangunan: fungsi, kepemilikan, umur, pengembangan baru, sifat pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan di sekitar Alun-alun Utara Yogyakarta sebagian masih merupakan bagian dari Keraton Yogyakarta (kedhaton). Bangunan yang ada disekitarnya diantaranya pasar, masjid agung maupun bangunan lain milik perseorangan. Fisik kawasan ditandai dengan vegetasi pohon beringin, pedestrian serta landmark tugu pal putih. Untuk kondisi fisik bangunan sangat beragam dilihat dari fungsi, pengembangan baru dan langam/tipologi bangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> Variabel dalam identifikasi lingkungan alun-alun menambah variabel dalam penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Lingkup materi penelitian tidak sampai merancang kawasan alun-alun Menambahkan variabel fungsi (nilai) kawasan dalam penentuan objek pelestarian

Peneliti	Judul	Lokasi Studi	Tujuan	Variabel/sub variabel	Metode	Hasil	Manfaat	Perbedaan
			<ul style="list-style-type: none"> Menganalisis bentuk konservasi dan program kegiatan yang mendukung upaya konservasi Mendesain rancangan lingkungan alun-alun 	baru, pemeliharaan, langgam <ul style="list-style-type: none"> Estetika Kejamakan Memperkuat citra kawasan Peranan sejarah Kelangkaan Keluarbiasaan 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis deskriptif-evaluatif 	<ul style="list-style-type: none"> Bentuk upaya konservasi yang dipilih adalah renovasi dan rehabilitasi/adaptasi dengan memperbaiki material eksterior maupun interior bangunan Kegiatan pendukung dapat berupa kegiatan budaya, rekreasi taman kota dan kegiatan ekonomi/perdagangan Desain rancangan lingkungan Alun-alun Utara Yogyakarta		
5. Samuel Hartono dan Handinoto (2005)	Alun-alun dan Revitalisasi Kota Tuban	Pusat Kota Tuban	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi perkembangan dan pengembangan struktur pusat Kota Tuban Mengidentifikasi dan menganalisis elemen identitas pembentuk ruang Kota Tuban 	Perkembangan struktur pusat kota: elemen identitas, <i>linkage</i>	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> Struktur ruang pusat Kota Tuban tidak mengalami perubahan sejak jaman kolonial hingga sekarang, tetapi hanya mengalami perkembangan. Struktur inti kotanya berupa alun-alun, Bangunan di sekeliling alun-alun (Kantor Kabupaten dan Asisten Residen, Masjid, Kantor Pos, Kantor Pengadilan, Penjara), bekas perumahan pejabat kolonial, Daerah Pecinan. Elemen identitas pembentuk ruang Kota Tuban: Kawasan Boom, Masjid Raya, Bangunan Kelenteng 	Aspek <i>linkage</i> dapat dimasukkan sebagai variabel dalam identifikasi kawasan alun-alun pada penelitian yang akan dilakukan	1. Membahas perkembangan kawasan pusat kota untuk menemukan elemen identitas pembentuk ruang kotanya sebagai dasar upaya revitalisasi, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan selain membahas perkembangan kawasan juga diperkuat dengan analisis potensi pelestarian sebagai dasar arahan pelestarian.

Sumber: (Wulandari, 2002; Wulandari, Lisa D, 2004; Rakhmawati, 2005; Hardiyanto, 1993; Handinoto&Samuel Hartono, 2005).

